

**LAPORAN KINEJA (LKJ)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan selama satu tahun anggaran.

Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui laporan ini disajikan informasi mengenai capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk keberhasilan, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan di daerah. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan kinerja di masa yang akan datang. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di masa mendatang.

Belahhari, Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut,



MYRZA FAZRINA, ST, MT
NIP.198003222006042012

DAFTAR ISI

.....	i
LAPORAN KINERJA (LKJ)	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	i
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Maksud Dan Tujuan	3
C. Dasar Hukum	4
D. Cascading Kinerja	4
E. Proses Bisnis, Tugas Dan Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	5
1) Proses Bisnis.....	5
2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi	6
F. Isu Strategis Perangkat Daerah	12
G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	1
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya.....	4
I. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	1
A. Visi RPJMD.....	1
B. Misi RPJMD.....	2
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	3
1) Indikator Kinerja Utama	284
D. Strategi dan Arah Kebijakan.....	285
E. Perjanjian Kinerja	286
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	289
A. Akuntabilitas Kinerja	289
1) Capaian Indikator Kinerja Utama (Iku).....	290
2) Analisa Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	291
3) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.	320
4) Faktor Pendorong/Keberhasilan Bidang Pendidikan	343
5) Faktor Penghambat/Kegagalan Bidang Pendidikan.....	344
6) Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan.....	345
7) Faktor Pendorong/Keberhasilan Bidang Kebudayaan	372

8) Faktor Penghambat/Kegagalan Bidang Kebudayaan.....	373
9) Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan Bidang Kebudayaan.....	374
B. Akuntabilitas Keuangan.....	377
BAB IV PENUTUP	385
A. Kesimpulan.....	385
B. Strategi Peningkatan Kinerja	385
LAMPIRAN	387

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Isu Strategis.....	1
Tabel 1. 2 Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025.....	1
Tabel 1. 3 Program, dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025	2
Tabel 1. 4 Tindak lanjut laporan hasil evaluasi sakiip tahun sebelumnya	4
Tabel 2. 2 Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran.....	12
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama	284
Tabel 2. 4 Tabel strategi dan arah kebijakan.....	285
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (hanya eselon II).....	287
Tabel 2. 6 Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025	288
Tabel 3. 1 Indikator Sasaran Strategis	290
Tabel 3. 2 Pengelompokkan Capaian Kinerja	292
Tabel 3. 3 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja	292
Tabel 3. 4 Tujuan dan indikator tujuan I	294
Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Terhadap Target 2025	294
Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra	295
Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional.....	296
Tabel 3. 8 Realisasi Program Penunjang	347
Tabel 3. 9 Efisiensi Sasaran Strategis 1 Indikator 1	348
Tabel 3. 10 Efisiensi Sasaran Strategis 1 Indikator 2	350
Tabel 3. 11 Efisiensi Sasaran Strategis 1 Indikator 3	352
Tabel 3. 12 Efisiensi Sasaran Strategis 1 Indikator 4	353
Tabel 3. 12 Efisiensi Sasaran Strategis 1 Indikator 5	355
Tabel 3. 12 Efisiensi Sasaran Strategis 1 Indikator 6	357
Tabel 3. 12 Efisiensi Sasaran Strategis 1 Indikator 7	358
Tabel 3. 12 Efisiensi Sasaran Strategis 1 Indikator 8	360
Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Terhadap Target 2025	362
Tabel 3. 14 Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra.....	363
Tabel 3. 15 Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional.....	363
Tabel 3. 16 Persentase Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang Lestari Tahun 2022 – 2025.....	364
Tabel 3. 17 Realisasi Program penunjang.....	375
Tabel 3. 18 Efisiensi Sasaran Strategis 2 Indikator 9	376
Tabel 3. 19 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	379
Tabel 3. 20 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember Tahun 2025	382
Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	383

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta proses bisnis level 0-3.....	6
Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi.....	6
Gambar 1. 3 Grafik Sumber Daya Manusia.....	2
Gambar 3. 1 Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 – 6 Tahun 2022 – 2025.....	297
Gambar 3. 2 Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 12 Tahun 2022 – 2025.....	300
Gambar 3. 3 Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 Tahun 2022 – 2025.....	302
Gambar 3. 4 Grafik Angka Partisipasi Sekolah (Aps) 7 – 18 Kesetaraan Tahun 2022 – 2025.....	305
Gambar 3. 5 Grafik Nilai Kemampuan Literasi SD Tahun 2022 – 2025.....	307
Gambar 3. 6 Nilai Kemampuan Literasi SMP Tahun 2021 – 2025.....	310
Gambar 3. 7 Grafik Nilai Kemampuan Numerasi SD Tahun 2022 – 2025.....	313
Gambar 3. 8 Nilai Kemampuan Numerasi SMP Tahun 2022 – 2025.....	317
Gambar 3. 9 Pembangunan dan revitalisasi gedung sekolah jenjang paud.....	323
Gambar 3. 10 Pembangunan dan revitalisasi gedung sekolah jenjang paud.....	324
Gambar 3. 11 Pembangunan dan revitalisasi gedung sekolah jenjang paud.....	324
Gambar 3. 12 Infrastruktur digital ChromeBook dan SmartBoard jenjang sd.....	326
Gambar 3. 13 Infrastruktur digital ChromeBook dan SmartBoard SD.....	326
Gambar 3. 14 Infrastruktur digital ChromeBook dan SmartBoard jenjang sd.....	327
Gambar 3. 15 Bimbingan teknis deep learning PAUD.....	330
Gambar 3. 16 Bimbingan Teknis Deep Learning SD.....	331
Gambar 3. 17 Bimbingan Teknis Deep Learning SMP.....	331
Gambar 3. 18 Pemberian Beasiswa Jenjang SMP.....	333
Gambar 3. 19 Pemberian Beasiswa Jenjang Sd.....	333
Gambar 3. 20 pemberian perlengkapan sekolah jenjang smp.....	335
Gambar 3. 21 pemberian perlengkapan sekolah jenjang sd.....	335
Gambar 3. 22 bimbingan teknis kurikulum.....	337
Gambar 3. 23 bimbingan teknis kurikulum.....	337
Gambar 3. 24 bimbingan teknis kurikulum.....	338
Gambar 3. 25 penguatan literasi dan numerasi.....	339
Gambar 3. 26 penguatan literasi dan numerasi.....	339
Gambar 3. 27 penguatan literasi dan numerasi.....	340
Gambar 3. 28 lomba kreatifitas siswa berbahasa banjar.....	342
Gambar 3. 29 lomba kreatifitas siswa berbahasa banjar.....	342
Gambar 3. 30 Olimpiade siswa nasional smp.....	343
Gambar 3. 31 kegiatan jelajah cagar budaya.....	369
Gambar 3. 32 Kegiatan Cerdas Cermat Permuseuman.....	369
Gambar 3. 33 rehabilitasi makam keramat.....	370

DAFTAR LAMPIRA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan di masa yang akan datang

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut dalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

D. Cascading Kinerja

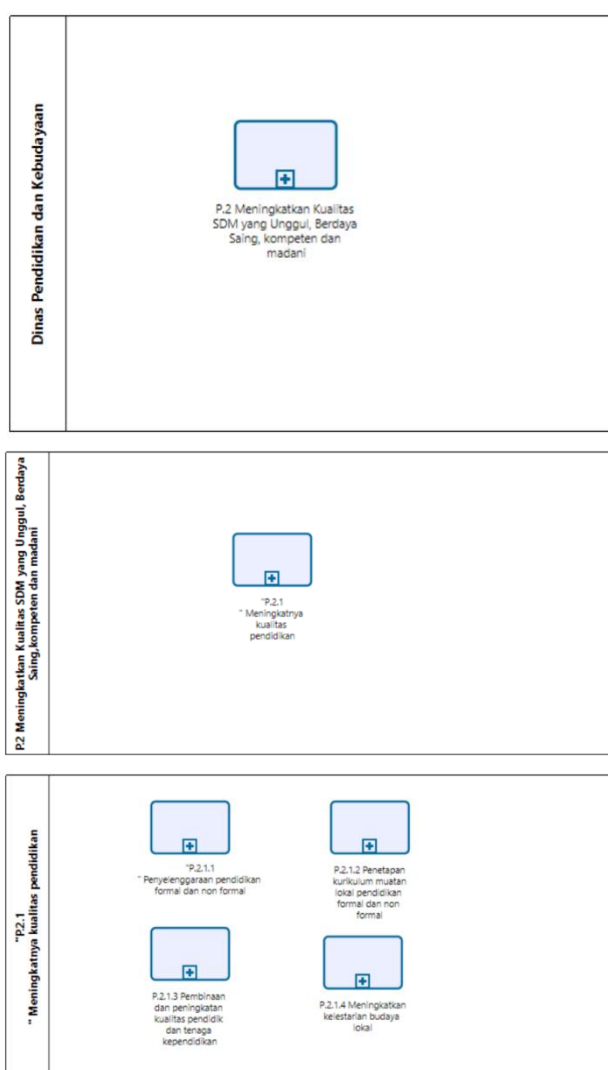
Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai

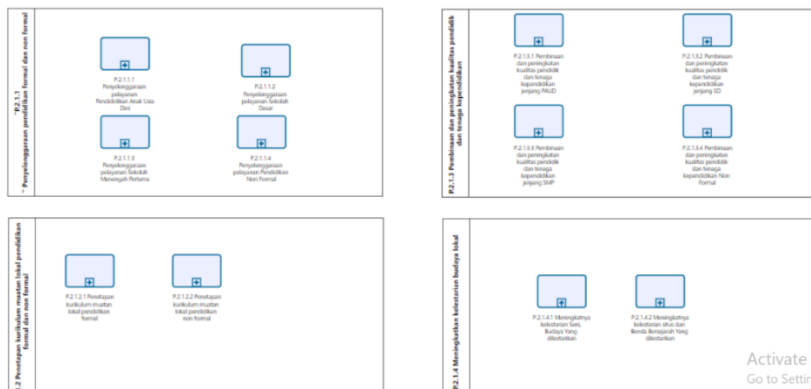
memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas Dan Fungsi Dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

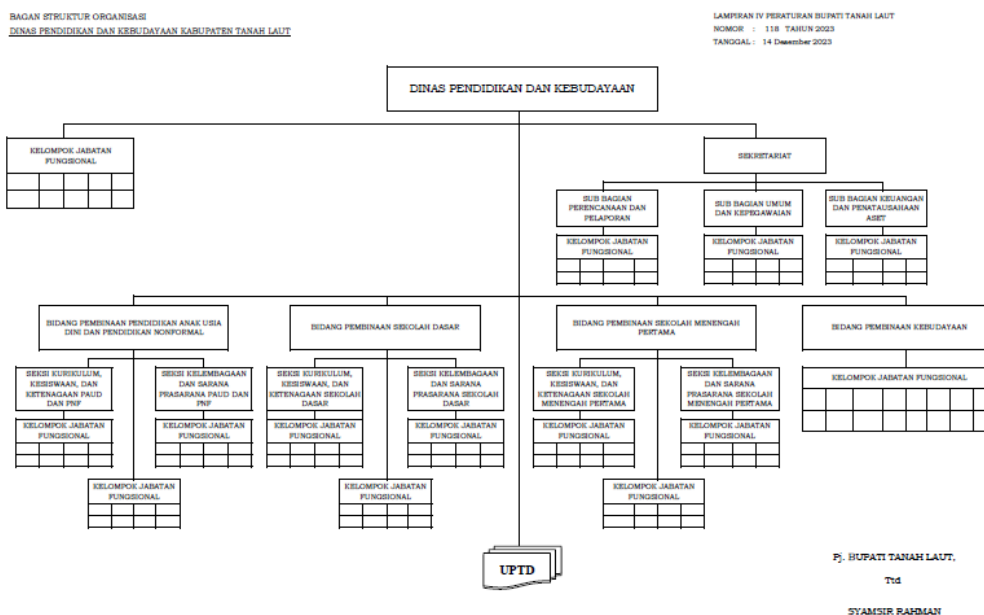




Gambar 1. 1 Peta proses bisnis level 0-3

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara urusan pendidikan dan kebudayaan. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan pendidikan dan kebudayaan. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, yakni:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan kesekretariatan
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran;
- c. administrasi umum dan kepegawaian; dan
- d. ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang lain di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. penyiapan peraturan perundang-undangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perengkapan;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan, dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - c. pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini; dan

- d. pendidikan nonformal berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Renja Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. perumusan kebijakan Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan anak usia dini;
- f. pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan nonformal;
- g. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah dasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang pembinaan sekolah dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Renja Bidang pembinaan sekolah dasar;
 - b. perumusan kebijakan di Bidang pembinaan sekolah dasar;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Bidang pembinaan sekolah dasar;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang pembinaan sekolah dasar;
 - e. pelaksanaan kebijakan pembinaan sekolah dasar;
 - f. pembukuan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di Bidang pembinaan sekolah dasar;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
- Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan; dan
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang pembinaan sekolah menengah pertama mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Renja Bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- b. perumusan kebijakan di Bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- e. pelaksanaan kebijakan pembinaan sekolah menengah pertama;

- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Pembinaan Kebudayaan

Bidang Pembinaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
- c. pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang pembinaan kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Renja Bidang pembinaan kebudayaan;
- b. perumusan kebijakan teknis di Bidang pembinaan kebudayaan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Bidang pembinaan kebudayaan;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang pembinaan kebudayaan;
- e. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- f. penyusunan bahan pembinaan di Bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- g. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
- h. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah;

- i. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam Daerah;
- j. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
- k. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal Daerah;
- l. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah;
- m. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah;
- n. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di Bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- o. pelaporan di Bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- q. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Tabel 1. 1 Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Masih tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS)	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sustainable Development Goals	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan
						Faktor Ekonomi dan Kemiskinan sebagai Penghambat Pendidikan
						Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pendidikan
						Kesenjangan Gender dalam Pendidikan
						Efektivitas Program dan Kebijakan Pemerintah dalam Penuntasan ATS

						Dampak Teknologi dan Perubahan Sosial terhadap Pendidikan
	Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sustainable Development Goals	Komitmen pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Kurang Berimbangnya Ketidakseimbangan antara tingkat kerusakan sarana dan prasarana pendidikan dengan upaya pengadaan dan perbaikannya menghambat proses pembelajaran yang optimal
						Belum terpenuhinya jumlah ideal Chromebook dalam pelaksanaan ANBK berdampak pada efektivitas asesmen dan kesiapan sekolah dalam implementasi ujian berbasis digital

	Kompetensi kepala sekolah yang belum merata berdampak pada efektivitas manajemen sekolah dan peningkatan mutu pendidikan	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sustainable Development Goals	Komitmen pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Perbedaan kompetensi kepala sekolah dalam merespons kebutuhan masyarakat menyebabkan ketidakseimbangan dalam jumlah penerimaan peserta didik antar satuan pendidikan
	Jumlah pengawas yang tidak memadai menyebabkan keterbatasan dalam pemantauan, evaluasi, dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sustainable Development Goals	Komitmen pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Ketidakseimbangan jumlah pengawas sekolah dengan penggantinya melemahkan supervisi dan berdampak pada mutu pendidikan

	Penyelenggara pendidikan kesetaraan belum optimal dalam menjangkau seluruh peserta didik	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sustainable Development Goals	Komitmen pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Pendidikan kesetaraan yang belum optimal menghambat akses belajar dan meningkatkan kesenjangan pendidikan
	Jumlah pendidik bersertifikat dan berkualifikasi S1 belum merata di semua satuan pendidikan	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sustainable Development Goals	Komitmen pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Proses seleksi PPG yang ketat memperlambat pemenuhan tenaga pendidik
	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi belum merata dan tepat sasaran	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sustainable Development Goals	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Ketidakmerataan beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi menghambat akses pendidikan berkualitas

	Pendidikan karakter belum optimal dalam menyiapkan SDM menghadapi bonus demografi	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sustainable Development Goals	Komitmen pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Lemahnya pendidikan karakter menghambat daya saing generasi muda di era bonus demografi
	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan belum optimal dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi.	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sustainable Development Goals	Komitmen pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Kurangnya upaya pelestarian dan revitalisasi budaya lokal mengancam identitas budaya di tengah globalisasi

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

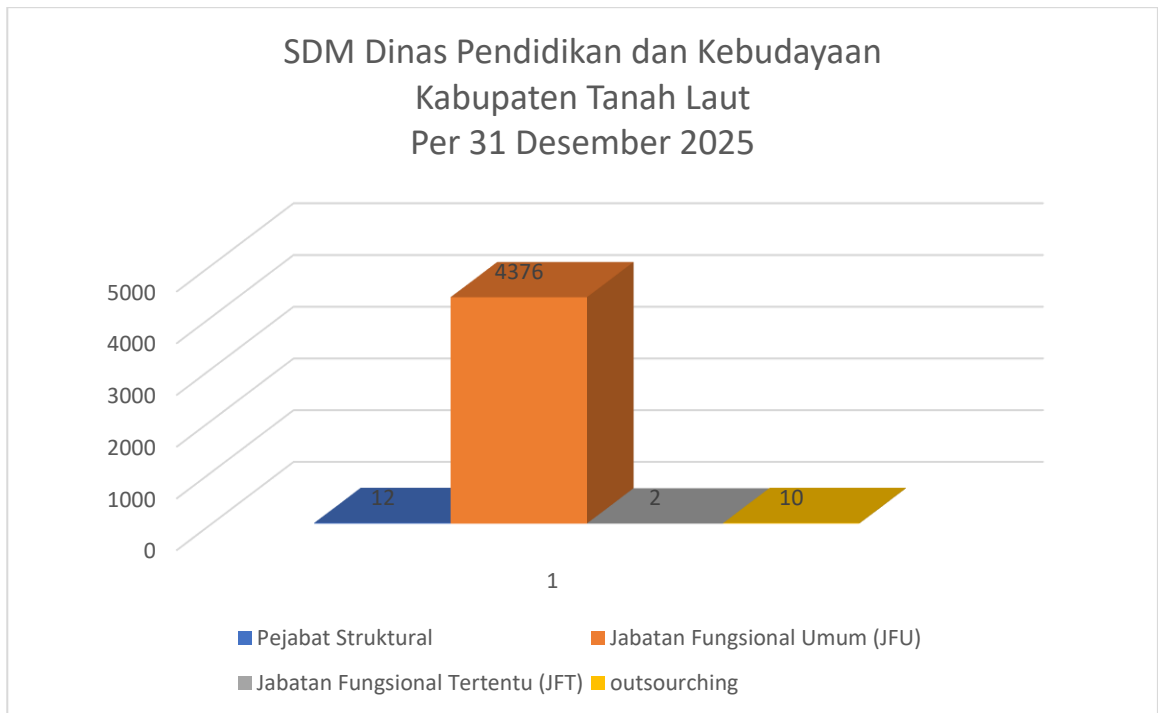
Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 4390 orang yang terdiri dari 2080 PNS, 1407 PPPK penuh waktu dan 903 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1. 2 Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	Total	Pendidikan								Lainnya	Total
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD			
647	1359	70	4	1407	3487	78	1807	3	27	67	8	-	90	2080	
PPPK							1335	15		55	2			1407	
PPPK Paruh Waktu							489	10		378	21	5		903	
Sub Total														4390	

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sesuai peta jabatan adalah 4400 (empat ribu empat ratus) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 4390 (empat ratus tiga puluh sembilan) orang. Terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.



Gambar 1. 3 Grafik Sumber Daya Manusia

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 12 Pejabat struktural, 2 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 4376 orang fungsional umum (JFU) dan 10 tenaga outsourcing.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan 4 unit gedung kantor, 1 mushalla dan 3 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 9 unit kendaraan roda empat, dan kendaraan roda dua 103 unit.

Tabel 1. 3 Program, dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

N o.	Program, Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Penanggung Jawab
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	651.399.784.959,20	663.066.204.752,15	Kepala Disdikbud
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	469.098.196.314,80	475.972.145.482,82	Sekretaris
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	467.078.352,80	200.517.396,81	Kasubbag Perencanaan

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	463.822.505.065,80	465.731.091.097,70	Kasubbag Keuangan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	72.658.702,56	36.057.279,68	Kasubbag Umpeg
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	358.449.170,41	285.875.172,13	Kasubbag Umpeg
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	682.649.136,59	788.952.261,12	Kasubbag Umpeg
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.473.908,00	658.869.675,36	Kasubbag Umpeg
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.056.035.318,64	7.925.435.940,02	Kasubbag Umpeg
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.473.908,00	345.346.660,00	Kasubbag Umpeg
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	176.908.368.288,06	181.412.792.193,82	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	97.681.977.919,97	104.020.640.430,68	Kabid SD
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	41.108.953.390,40	40.710.289.321,43	Kabid SMP
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	30.971.087.350,55	29.394.334.681,09	Kabid PAUD & PNF
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.146.349.627,14	7.287.527.760,62	Kabid PAUD & PNF
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	272.477.809,72	235.880.331,60	Kabid SD & SMP
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	272.477.809,72	235.880.331,60	Kabid SD & SMP
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.787.217.192,79	4.342.108.636,42	Kabid Kebudayaan
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.787.217.192,79	4.342.108.636,42	Kabid RIDA
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	299.965.412,51	299.917.046,36	Kabid Kebudayaan

	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	299.965.412,51	299.917.046,36	Kabid Kebudayaan
6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	49.999.798,31	49.999.661,98	Kabid Kebudayaan
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.999.798,31	49.999.661,98	Kabid Kebudayaan
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	983.560.143,01	753.361.399,15	Kabid Kebudayaan
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	183.564.797,71	39.441.107,65	Kabid Kebudayaan
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	799.995.345,30	713.920.291,50	Kabid Kebudayaan

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/246/LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025 bahwa ada 5 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

Tabel 1. 4 Tindak lanjut laporan hasil evaluasi sakiip tahun sebelumnya

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas rencana aksi tindak lanjut (RATL) atas catatan - catatan	Telah dilaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap triwulannya berdasarkan bukti undangan terlampir	2 kali	Tw III – IV 2025	Sekretaris	Telah dilaksanakan rapat evaluasi monitoring setiap triwulan

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Status/Progres Penyelesaian
	perbaikan yang perlu dilakukan.					
2	Agar menetapkan target kinerja kedepannya mempertimbangkan peningkatan yang lebih signifikan dan progresif, sehingga tidak hanya realistis untuk dicapai, tetapi juga memberikan tantangan yang mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan	Melaksanakan penetapan kinerja memperhatikan realisasi kinerja tahun sebelumnya	1 dokumen	Tw I 2026	Sekretaris	<u>Telah dilaksanakan</u>
3	Agar pimpinan SKPD secara konsisten memberikan umpan balik dalam penilaian SKP bulanan dalam bentuk narasi yang membuat analisis capaian kinerja, hambatan, serta faktor pendukung	Pimpinan SKPD telah memberikan umpan balik dalam penilaian SKP bulanan dalam bentuk narasi dibuktikan dengan screenshot penilaian pada aplikasi e-kinerja	2 kali	Tw III – IV 2025	Kepala Dinas	Telah dilaksanakan penilaian pada aplikasi e-kinerja
4	Agar penyusunan laporan kinerja kedepannya dilengkapi dengan penjelasan yang lebih rinci dan komprehensif mengenai keberhasilan maupun kegagalan pada setiap indikator sasaran kinerja, sehingga dapat memberikan Gambaran yang lebih jelas, objektif, dan menyeluruh terhadap capaian kinerja	Akan ditindak lanjuti pada penyusunan Laporan Kinerja di Tahun 2026	1 dokumen	Tw I 2026	Sekretaris	Akan dilaksanakan pada tahun 2026
5	Agar memanfaatkan laporan kinerja triwulanan yang telah disusun sebagai bahan analisis capaian, hambatan,	Melaksanakan penetapan kinerja memperhatikan realisasi kinerja tahun sebelumnya	1 dokumen	Tw I 2026	Sekretaris	<u>Telah dilaksanakan</u>

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Status/Progres Penyelesaian
	dan factor pendukung, serta menjadikan dasar dalam pengambilan Keputusan dan perbaikan kinerja pada priode selanjutnya					

I. **Sistematika Penyajian**

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan .

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,
Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui sinergi dan kolaborasi yang terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan, pelestarian nilai-nilai budaya daerah, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dalam menjalankan peran tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, profesionalisme sumber daya manusia, serta kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis data. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi juga menjadi bagian penting guna memastikan setiap program

dan kegiatan berjalan tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat.

Selain itu, komitmen terhadap inovasi dan transformasi layanan pendidikan dan kebudayaan perlu terus dikembangkan seiring dengan dinamika perkembangan zaman. Melalui penerapan tata kelola yang transparan, responsif, dan adaptif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut diharapkan mampu menjadi institusi yang unggul, terpercaya, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut.

Pemerintah Daerah menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 1 “Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan termasuk dalam mendukung tujuan pertama yaitu Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing adalah Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Nilai Raport Pendidikan.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan adalah Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan adalah

Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dan Meningkatnya kelestarian Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang Dilestarikan.

Tabel 2. 1 Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah	7.94	7.98	8	8.1	8.2	8.3	8.4
			Harapan Lama Sekolah	12.43	12.45	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9
			Nilai Raport Pendidikan	74.36	74.46	74.66	74.86	75	75.2	75.4
	1.	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 Tahun (Angka)	87,15	87,18	87,21	87,24	87,27	87,3	87,33
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 Tahun (Angka)	98,5	98,53	98,56	98,59	98,62	98,65	98,68
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 Tahun (Angka)	93,98	94,01	94,04	94,07	94,1	94,13	94,16
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan Tahun (Angka)	54,73	54,76	54,79	54,82	54,85	54,88	54,91

			Nilai Kemampuan Literasi SD (Nilai)	71	71,03	71,06	71,09	71,12	71,15	71,18
			Nilai Kemampuan Literasi SMP (Nilai)	83,56	83,59	83,62	83,65	83,68	83,71	83,74
			Nilai Kemampuan Numerasi SD (Nilai)	54,71	54,74	54,77	54,8	54,83	54,86	54,89
			Nilai Kemampuan Numerasi SMP (Nilai)	78,06	78,09	78,12	78,15	78,18	78,21	78,24
	2	Meningkatnya kelestarian Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang Dilestarikan	Persentase Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang Lestari (%)	60	60,03	60,06	60,09	60,12	60,15	60,18

1) Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 04 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1.	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 Tahun (Angka)	$= \frac{\text{jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi)}}{\text{jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun}} \times 100\%$
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 Tahun (Angka)	$= \frac{\text{jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi)}}{\text{jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun (Angka)	$= \frac{\text{jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi)}}{\text{jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan Tahun (Angka)	$= \frac{\text{Jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah total anak usia 7 - 18 tahun yang seharusnya mengikuti pendidikan kesetaraan}} \times 100\%$
		Nilai Kemampuan Literasi SD (Nilai)	Hasil Asesmen Nasional (AN) Peserta didik
		Nilai Kemampuan Literasi SMP (Nilai)	Hasil Asesmen Nasional (AN) Peserta didik
		Nilai Kemampuan Numerasi SD (Nilai)	Hasil Asesmen Nasional (AN) Peserta didik
		Nilai Kemampuan Numerasi SMP (Nilai)	Hasil Asesmen Nasional (AN) Peserta didik

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
2	Meningkatnya kelestarian Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang Dilestarikan	Persentase Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang Lestari (%)	$= \frac{\text{Jumlah Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang di Lestarikan}}{\text{Jumlah Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang ada}} \times 100\%$

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2. 3 Tabel strategi dan arah kebijakan

No	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RESNTRA	KET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Peningkatan sarana, prasarana dan aksesibilitas yang sesuai standar dan merata di semua sekolah	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	
		Penyediaan tenaga kependidikan untuk pendidikan inklusif serta pengembangan kompetensi melalui beasiswa tenaga pendidik	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Profesional Dan Berkualitas	

		Pemberian bantuan pendidikan (meliputi dana pendidikan dan beasiswa) bagi pelajar mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi	Pemberian Beasiswa berprestasi dan kurang mampu	
		Inventarisasi dan pengajuan pendaftaran benda, bangunan, struktur, situs dan cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut	Pendataan Adat Tradisi Di Kabupaten Tanah Laut dan penetapan cagar budaya	
		Pemeliharaan secara berkala benda, bangunan, struktur, situs dan cagar budaya yang sudah ditetapkan	Pendataan Kelompok Komunitas Budaya, Pemeliharaan Situs Budaya Dan Makam Keramat	

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (hanya eselon II)

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 – 6 Tahun (Angka)	87,18	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 12 Tahun (Angka)	98,53	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 Tahun (Angka)	94,01	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan Tahun (Angka)	54,76	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		5	Nilai Kemampuan Literasi SD (Nilai)	71,03	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		6	Nilai Kemampuan Literasi SMP (Nilai)	83,59	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		7	Nilai Kemampuan Numerasi SD (Nilai)	54,74	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		8	Nilai Kemampuan Numerasi SMP (Nilai)	78,09	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Meningkatnya kelestarian Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang	1	Persentase Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang Lestari (%)	60,03	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

	Dilestarikan				
--	--------------	--	--	--	--

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 2 sasaran di atas, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 663.066.204.752,15. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2. 5 Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	475.972.145.482,82
		Program Pengelolaan Pendidikan	181.412.792.193,82
		Program Pengembangan Kurikulum	235.880.331,60
2	Meningkatnya kelestarian Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang Dilestarikan	Program Pengembangan Kebudayaan	4.342.108.636,42
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	299.917.046,36
		Program Pembinaan Sejarah	49.999.661,98
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	753.361.399,15
		JUMLAH	663.066.204.752,15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 terdapat 2 sasaran dengan 9 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 102,25%.

1) Capaian Indikator Kinerja Utama (Iku)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Pendidikan							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7
1.	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 – 6 Tahun (Angka)	87,18	81,17	93,11 %	Sangat Tinggi
		2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 12 Tahun (Angka)	98,53	98,73	100,20%	Sangat Tinggi
		3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 Tahun (Angka)	94,01	93,36	99,31 %	Sangat Tinggi
		4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan Tahun (Angka)	54,76	56,93	103,96	Sangat Tinggi

		5	Nilai Kemampuan Literasi SD (Nilai)	71,03	71,98	101,34	Sangat Tinggi
		6	Nilai Kemampuan Literasi SMP (Nilai)	83,59	83,59	100 %	Sangat Tinggi
		7	Nilai Kemampuan Numerasi SD (Nilai)	54,74	63,67	116,31 %	Sangat Tinggi
		8	Nilai Kemampuan Numerasi SMP (Nilai)	78,09	78,12	100,04 %	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kelestarian Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang Dilestarikan	1	Persentase Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang Lestari (%)	60,03	63,64	106,01 %	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025						102,25 %	Sangat Tinggi

2) Analisa Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 2 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 9 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang **Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana**

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Pengelompokan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<p><i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i></p> <p>Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.</p>	<p>Realisasi</p> <p>----- X 100%</p> <p>Target</p>
Asumsi II (kondisi tidak umum)	<p><i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i></p>	<p>Target</p> <p>----- X</p> <p>100%</p> <p>Realisasi</p>
	<p><i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i></p>	<p>Target</p> <p>----- X</p> <p>100%</p> <p>Realisasi</p>

	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	
--	--	--

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Meningkatnya Kualitas Pendidikan**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 3 indikator yaitu :

1. Rata-Rata Lama Sekolah
2. Harapan Lama Sekolah
3. Nilai Raport Pendidikan

Tabel 3. 4 Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.98
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.45
		Nilai Raport Pendidikan	nilai	74.46

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan
2. Meningkatnya kelestarian Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang Dilestarikan

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan

Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan diukur melalui 8 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	TAHUN 2025
----	---------	-------------------	--------	-----------	------------

				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 Tahun (Angka)			75,16	87,15	87,18	81,17	93,11 %
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 Tahun (Angka)		99,54	98,71	98,5	98,53	98,73	100,20%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 Tahun (Angka)		91,77	91,8	93,98	94,01	93,36	99,31 %
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan Tahun (Angka)			11,15	54,73	54,76	56,93	103,96 %
		Nilai Kemampuan Literasi SD (Nilai)		52,92	71	61,97	71,03	71,98	101,34 %
		Nilai Kemampuan Literasi SMP (Nilai)		60,32	83,56	78,31	83,59	83,59	100 %
		Nilai Kemampuan Numerasi SD (Nilai)		28,13	41,78	54,71	54,74	63,67	116,31 %
		Nilai Kemampuan Numerasi SMP (Nilai)		38,43	52,72	78,06	78,09	78,12	100,04 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									101,78%

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 Tahun (Angka)		87,18	81,17	93,11 %	87,3	107,55
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 Tahun (Angka)		98,53	98,73	100,20%	98,65	99,92
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 Tahun (Angka)		94,01	93,36	99,31 %	94,13	100,82

		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan Tahun (Angka)		54,76	56,93	103,96 %	54,88	96,40
		Nilai Kemampuan Literasi SD (Nilai)		71,03	71,98	101,34 %	71,15	98,85
		Nilai Kemampuan Literasi SMP (Nilai)		83,59	83,59	100 %	83,71	100,14
		Nilai Kemampuan Numerasi SD (Nilai)		54,74	63,67	116,31 %	54,86	86,16
		Nilai Kemampuan Numerasi SMP (Nilai)		78,09	78,12	100,04 %	78,21	100,12

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tanah bumbu	Kotabaru	Banjar	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 Tahun (Angka)	%	89,54	85,85	83,53	88,10	74,15
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 Tahun (Angka)	%	99,63	99,36	97,64	99,41	99,23
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 Tahun (Angka)	%	93,91	92,44	88,24	93,91	96,30
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan Tahun (Angka)	%	38,60	19,89	49	48,27	24,81
		Nilai Kemampuan Literasi SD (Nilai)	%	65,21	66,84	75,9	75,51	71,81
		Nilai Kemampuan Literasi SMP (Nilai)	%	75,71	75,82	83,31	77,31	72,07
		Nilai Kemampuan Numerasi SD (Nilai)	%	58,35	61,46	72,68	71,80	69,58
		Nilai Kemampuan Numerasi SMP (Nilai)	%	71,31	71,35	77,67	73,11	69,61

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 – 6 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun adalah persentase penduduk usia 5-6 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi), dibandingkan dengan seluruh penduduk usia 5 – 6 tahun pada periode dan wilayah tertentu.

Untuk memperoleh Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 – 6 Tahun dengan rumus sebagai berikut :

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 Tahun =	$\frac{\text{jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang sedang bersekolah(tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh)}}{\text{jumlah penduduk usia 5-6 tahun}} \times 100 \%$
---	--

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun dalam penyajian data ini bersumber dari Rapor Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Data tersebut diolah berdasarkan hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang menjadi bagian dari sistem evaluasi pendidikan nasional.

Melalui Rapor Pendidikan, hasil AKM dikompilasi dan dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi satuan pendidikan, termasuk tingkat partisipasi anak usia dini. Dengan demikian, APS usia 5–6 tahun yang ditampilkan mencerminkan data resmi yang telah melalui proses verifikasi dan pengolahan secara sistematis sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan.



Gambar 3. 1 Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 – 6 Tahun 2022 – 2025

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun menunjukkan adanya dinamika perkembangan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, realisasi APS tercatat sebesar 75,15. Angka ini kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi 87,15, yang menunjukkan adanya perbaikan akses dan partisipasi pendidikan anak usia dini.

Pada tahun 2025, ditetapkan target sebesar 87,18. Namun, hingga akhir periode pelaporan, realisasi yang dicapai sebesar 81,17 atau setara dengan 93,11% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian tersebut tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik karena mampu mempertahankan angka partisipasi di atas realisasi tahun 2023, walaupun sedikit menurun dibandingkan capaian tahun 2024.

Secara keseluruhan, tren dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 ke 2024, serta upaya mempertahankan tingkat partisipasi pada tahun 2025 meskipun menghadapi tantangan yang memengaruhi pencapaian target secara penuh.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun menunjukkan masih adanya selisih yang perlu menjadi perhatian. Pada tahun 2025, realisasi APS tercatat sebesar 81,17, sedangkan target akhir Renstra yang telah ditetapkan adalah sebesar 87,3.

Dengan demikian, capaian tahun 2025 masih berada di bawah target akhir Renstra, dengan selisih sebesar 6,13 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi anak usia 5–6 tahun sudah berada pada kategori cukup baik, masih diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan akses serta keterlibatan anak usia dini dalam layanan pendidikan agar target yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra dapat tercapai secara optimal.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Tanah Laut sebesar 81,17 masih berada di bawah beberapa kabupaten lain di wilayah yang sama. Kabupaten Tanah Bumbu mencatat capaian tertinggi sebesar 89,54, disusul Kabupaten Kotabaru sebesar 85,85, dan Kabupaten Banjar sebesar 83,53.

Apabila dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi, APS usia 5–6 tahun di Kalimantan Selatan mencapai 88,10, yang juga lebih tinggi daripada capaian Tanah Laut. Namun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, capaian Tanah Laut masih berada di atas angka nasional Indonesia yang sebesar 74,15.

Secara keseluruhan, posisi Tanah Laut berada pada kategori menengah di tingkat kabupaten/kota dalam provinsi, masih memerlukan peningkatan untuk dapat menyamai atau melampaui rata-rata provinsi, namun tetap menunjukkan kinerja yang relatif baik karena melampaui rata-rata nasional.

b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 12 Tahun (Angka)

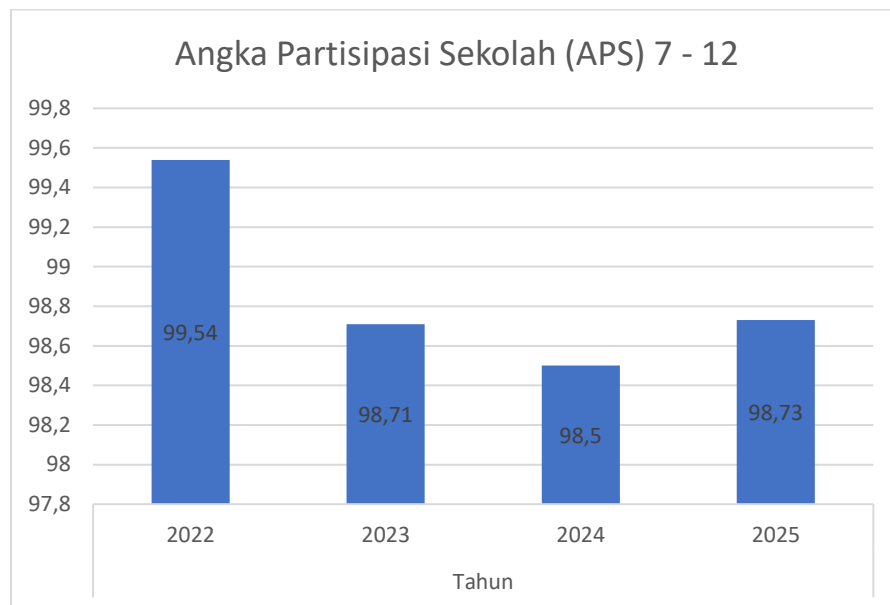
Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 – 12 tahun adalah persentase penduduk usia 7 - 12 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh), dibandingkan dengan seluruh penduduk usia 7 – 12 tahun pada periode dan wilayah tertentu.

Untuk memperoleh Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 12 Tahun dengan rumus sebagai berikut :

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 Tahun =	$\frac{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah(tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh)}}{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}}$	x 100 %
--	--	---------

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun dalam penyajian data ini bersumber dari Rapor Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Data tersebut diolah berdasarkan hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang menjadi bagian dari sistem evaluasi pendidikan nasional.

Melalui Rapor Pendidikan, hasil AKM dikompilasi dan dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi satuan pendidikan, termasuk tingkat partisipasi anak usia dini. Dengan demikian, APS usia 7–12 tahun yang ditampilkan mencerminkan data resmi yang telah melalui proses verifikasi dan pengolahan secara sistematis sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan.



Gambar 3. 2 Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 12 Tahun 2022 – 2025

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kondisi yang relatif stabil pada angka yang sangat tinggi. Pada tahun 2022, realisasi APS tercatat sebesar 99,54. Selanjutnya pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 98,71, dan kembali menurun tipis pada tahun 2024 menjadi 98,50.

Memasuki tahun 2025, ditetapkan target sebesar 98,53. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi yang dicapai sebesar 98,73, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,20%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 tidak hanya melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi juga menunjukkan perbaikan dibandingkan capaian tahun 2024.

Secara umum, meskipun terjadi fluktuasi kecil dalam tiga tahun terakhir, APS usia 7–12 tahun tetap berada pada kategori sangat tinggi dan cenderung stabil. Keberhasilan melampaui target pada tahun 2025 mencerminkan efektivitas upaya mempertahankan akses pendidikan dasar bagi seluruh anak usia sekolah dasar.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun menunjukkan capaian yang sangat baik. Pada tahun 2025, realisasi APS tercatat sebesar 98,73, sedangkan target akhir Renstra yang telah ditetapkan sebesar 98,65.

Dengan demikian, realisasi tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra sebesar 0,08 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya dalam menjaga dan meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang usia sekolah dasar berjalan secara efektif dan konsisten. Capaian tersebut sekaligus menegaskan komitmen dalam memastikan hampir seluruh anak usia 7–12 tahun memperoleh akses dan tetap berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Tanah Laut sebesar 81,17 masih berada jauh di bawah daerah pembanding lainnya. Kabupaten Tanah Bumbu mencatat capaian sebesar 99,63, diikuti Kabupaten Kotabaru sebesar 99,36, dan Kabupaten Banjar sebesar 97,64.

Pada tingkat provinsi, capaian Kalimantan Selatan mencapai 99,41, sedangkan rata-rata nasional Indonesia berada pada angka 99,23.

Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara capaian Tanah Laut dengan kabupaten lain, rata-rata provinsi, maupun nasional. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan langkah strategis yang lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi pendidikan usia 7–12 tahun agar dapat mendekati bahkan menyamai capaian daerah lain yang telah berada pada kategori sangat tinggi.

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 Tahun (Angka)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13 – 15 tahun adalah persentase penduduk usia 13 - 15 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang

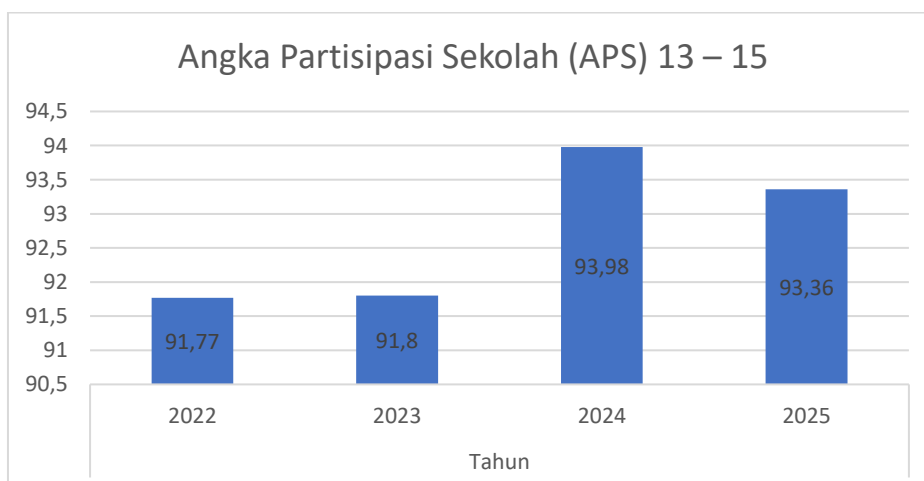
ditempuh), dibandingkan dengan seluruh penduduk usia 13 – 15 tahun pada periode dan wilayah tertentu.

Untuk memperoleh Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 Tahun dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun} = \frac{\text{jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah(tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh)}}{\text{jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100$$

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13–15 tahun dalam penyajian data ini bersumber dari Rapor Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Data tersebut diolah berdasarkan hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang menjadi bagian dari sistem evaluasi pendidikan nasional.

Melalui Rapor Pendidikan, hasil AKM dikompilasi dan dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi satuan pendidikan, termasuk tingkat partisipasi anak usia dini. Dengan demikian, APS usia 13–15 tahun yang ditampilkan mencerminkan data resmi yang telah melalui proses verifikasi dan pengolahan secara sistematis sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan.



Gambar 3. 3 Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 Tahun 2022 – 2025

- 1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13–15 tahun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2022, realisasi APS tercatat sebesar 91,77, kemudian mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2023 menjadi 91,80. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan realisasi mencapai 93,98.

Pada tahun 2025, ditetapkan target sebesar 94,01. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi yang dicapai sebesar 93,36 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,31%. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, selisihnya relatif kecil dan tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Secara keseluruhan, perkembangan APS usia 13–15 tahun memperlihatkan adanya kemajuan dibandingkan tahun-tahun awal, khususnya jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023. Walaupun terjadi sedikit penurunan dibandingkan capaian tahun 2024, angka partisipasi tetap berada pada level tinggi, mencerminkan upaya yang konsisten dalam memperluas dan mempertahankan akses pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13–15 tahun menunjukkan bahwa capaian masih sedikit berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, realisasi APS tercatat sebesar 93,36, sedangkan target akhir Renstra ditetapkan sebesar 94,13.

Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 0,77 poin antara realisasi dan target akhir Renstra. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian tersebut tetap berada pada kategori tinggi dan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang usia 13–15 tahun relatif terjaga dengan baik. Ke depan, diperlukan penguatan strategi untuk menutup selisih tersebut agar target akhir Renstra dapat tercapai secara optimal.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13–15 tahun menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Tanah Laut sebesar 93,36 berada pada posisi yang relatif kompetitif di tingkat kabupaten/kota. Angka tersebut sedikit di bawah capaian Kabupaten Tanah Bumbu yang sebesar 93,91, dan juga di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan yang tercatat sebesar 93,91. Namun demikian, capaian Tanah Laut masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Kotabaru sebesar 92,44 dan Kabupaten Banjar sebesar 88,24. Sementara itu, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional Indonesia yang mencapai 96,30, capaian Tanah Laut masih berada di bawah angka nasional.

Secara keseluruhan, posisi Tanah Laut dapat dikategorikan cukup baik di tingkat kabupaten dalam provinsi, namun masih memerlukan upaya peningkatan agar dapat menyamai capaian provinsi dan mendekati rata-rata nasional.

d. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan Tahun (Angka)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 – 18 tahun adalah persentase penduduk usia 7 - 18 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh), dibandingkan dengan seluruh penduduk usia 13 – 15 tahun pada periode dan wilayah tertentu.

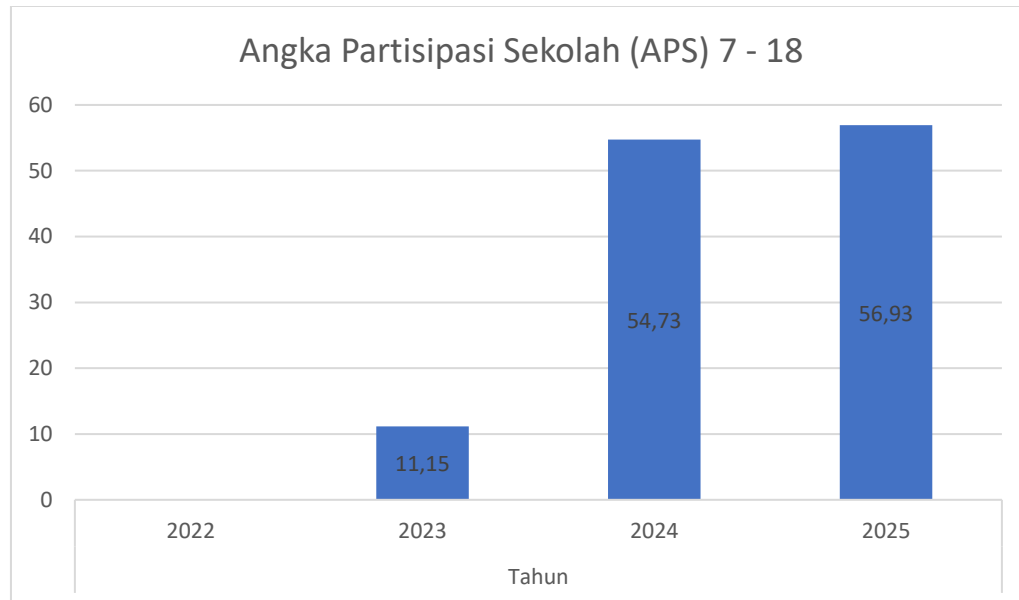
Untuk memperoleh Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 Tahun dengan rumus sebagai berikut :

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan Tahun =	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah total anak usia 7-18 tahun yang seharusnya mengikuti pendidikan kesetaraan}}$	$\times 100 \%$
---	--	-----------------

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13–15 tahun dalam penyajian data ini bersumber dari Rapor Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah. Data tersebut diolah berdasarkan hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang menjadi bagian dari sistem evaluasi pendidikan nasional.

Melalui Rapor Pendidikan, hasil AKM dikompilasi dan dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi satuan pendidikan, termasuk tingkat partisipasi

anak usia dini. Dengan demikian, APS usia 13–15 tahun yang ditampilkan mencerminkan data resmi yang telah melalui proses verifikasi dan pengolahan secara sistematis sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan.



Gambar 3. 4 Grafik Angka Partisipasi Sekolah (Aps) 7 – 18 Kesetaraan Tahun 2022 – 2025

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, realisasi APS tercatat sebesar 11,15. Selanjutnya pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang sangat besar dengan realisasi mencapai 54,73.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 54,76. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi yang dicapai sebesar 56,93 sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 103,96%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 tidak hanya melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi juga menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian tahun 2024.

Secara keseluruhan, perkembangan APS usia 7–18 tahun dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan tren yang meningkat secara signifikan. Capaian pada tahun 2025 yang melampaui target menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya meningkatkan partisipasi pendidikan bagi penduduk usia sekolah secara lebih luas.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun menunjukkan capaian yang sangat baik. Pada tahun 2025, realisasi APS tercatat sebesar 56,93, sedangkan target akhir Renstra yang telah ditetapkan adalah sebesar 54,88.

Dengan demikian, realisasi tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra sebesar 2,05 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya dalam meningkatkan partisipasi pendidikan bagi penduduk usia sekolah 7–18 tahun berjalan secara efektif dan mampu melampaui sasaran yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra. Hal ini juga mencerminkan adanya peningkatan akses serta keberlanjutan partisipasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Tanah Laut sebesar 56,93 berada pada posisi yang cukup baik dibandingkan beberapa daerah lain. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tanah Bumbu yang sebesar 38,60, Kabupaten Kotabaru sebesar 19,89, serta Kabupaten Banjar yang mencapai 49,00.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi, APS usia 7–18 tahun di Kalimantan Selatan tercatat sebesar 48,27, yang juga masih berada di bawah capaian Tanah Laut. Demikian pula apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional Indonesia sebesar 24,81, capaian Tanah Laut berada jauh di atas angka tersebut.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah usia 7–18 tahun di Tanah Laut relatif lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten lain maupun rata-rata provinsi dan nasional, sehingga mencerminkan kinerja yang positif dalam memperluas akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah.

e. Nilai Kemampuan Literasi SD (Nilai)

Nilai Kemampuan Literasi SD (Nilai) adalah skor yang menggambarkan tingkat kemampuan peserta didik sekolah dasar dalam memahami, menggunakan,

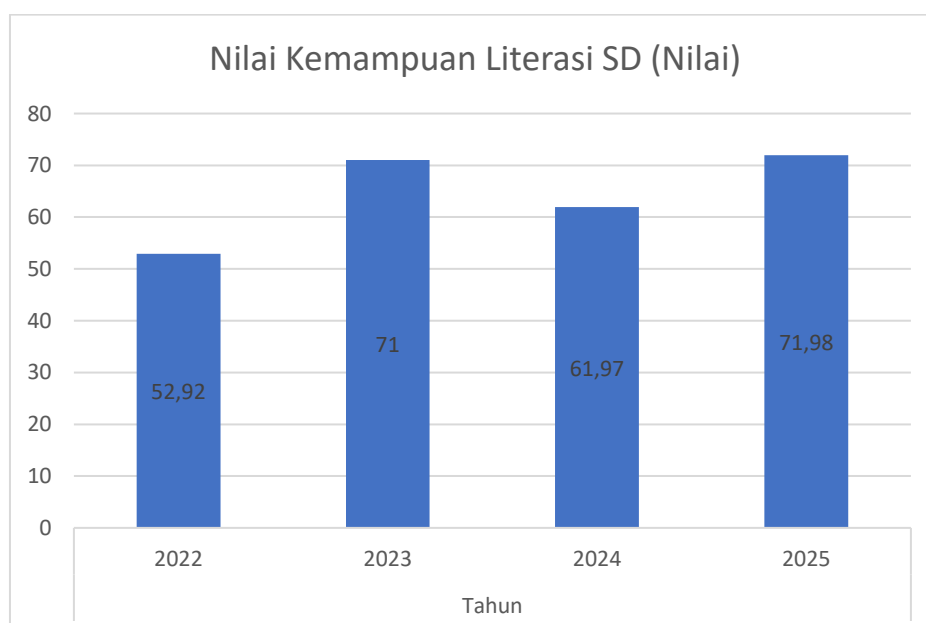
mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk mengembangkan pengetahuan serta berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

. Untuk memperoleh Nilai Kemampuan Literasi SD Tahun dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kemampuan Literasi SD} = \frac{\text{Hasil Asesmen Nasional (AN) Peserta didik}}{\text{Jumlah Peserta}} \times 100 \%$$

Nilai Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemampuan peserta didik dalam memahami dan menggunakan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis bacaan. Nilai ini diperoleh dari hasil pelaksanaan Asesmen Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah sebagai bagian dari sistem evaluasi pendidikan nasional.

Dalam pelaksanaannya, kemampuan literasi diukur melalui komponen Asesmen Kompetensi Minimum yang menilai kemampuan membaca peserta didik dalam memahami, menganalisis, serta merefleksikan informasi dari teks. Hasil asesmen tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam Rapor Pendidikan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kompetensi literasi peserta didik pada jenjang sekolah dasar, baik di tingkat sekolah, daerah, maupun nasional.



Gambar 3. 5 Grafik Nilai Kemampuan Literasi SD Tahun 2022 – 2025

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator Nilai Kemampuan Literasi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya dinamika perkembangan. Pada tahun 2022, realisasi nilai kemampuan literasi SD tercatat sebesar 52,92. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan realisasi mencapai 71,00.

Namun demikian, pada tahun 2024 nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 61,97. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2025 kembali menunjukkan peningkatan yang positif. Dengan target yang ditetapkan sebesar 71,03, realisasi yang dicapai pada tahun 2025 sebesar 71,98 sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 101,34%.

Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 tidak hanya berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi juga menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2024. Secara keseluruhan, perkembangan nilai kemampuan literasi SD dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan upaya peningkatan kualitas pembelajaran literasi yang semakin baik.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra pada indikator Nilai Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) menunjukkan capaian yang sangat baik. Pada tahun 2025, realisasi nilai kemampuan literasi SD tercatat sebesar 71,98, sedangkan target akhir Renstra yang telah ditetapkan sebesar 71,15.

Dengan demikian, realisasi tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra sebesar 0,83 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kemampuan literasi peserta didik pada jenjang sekolah dasar berjalan secara efektif dan mampu mencapai bahkan melampaui sasaran yang telah direncanakan. Hal tersebut juga mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas proses pembelajaran, khususnya dalam penguatan kompetensi literasi peserta didik di tingkat sekolah dasar.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 pada indikator Nilai Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Tanah Laut sebesar 71,98 berada pada posisi yang cukup baik dibandingkan beberapa kabupaten lain. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian Kabupaten Tanah Bumbu yang sebesar 65,21 serta Kabupaten Kotabaru sebesar 66,84.

Namun demikian, capaian Tanah Laut masih berada di bawah Kabupaten Banjar yang mencapai 75,90 serta rata-rata provinsi Kalimantan Selatan yang tercatat sebesar 75,51. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional Indonesia sebesar 71,81, capaian Tanah Laut masih sedikit lebih tinggi.

Secara keseluruhan, nilai kemampuan literasi SD di Tanah Laut menunjukkan kinerja yang cukup kompetitif karena berada di atas beberapa kabupaten lain dan sedikit melampaui rata-rata nasional, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan untuk dapat menyamai atau melampaui capaian rata-rata provinsi.

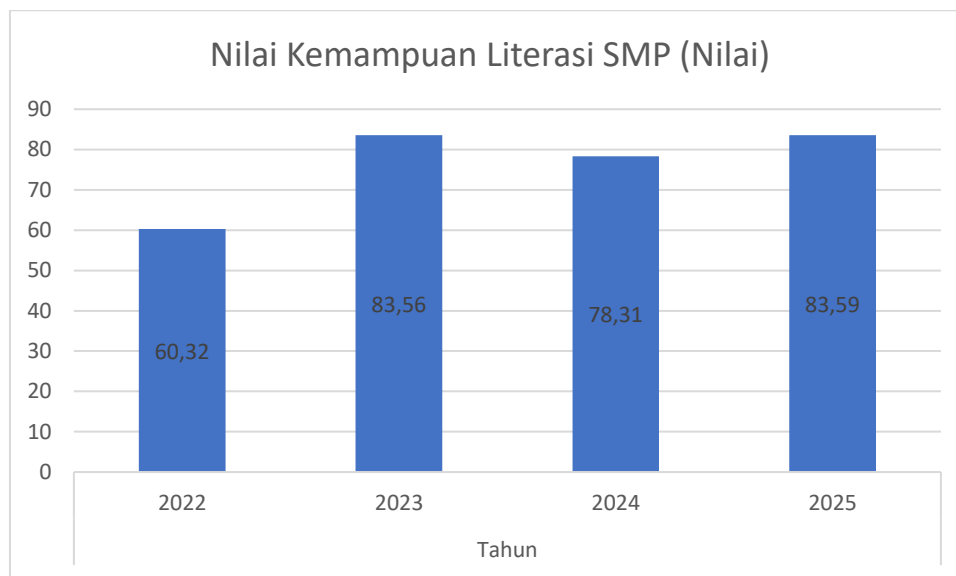
f. Nilai Kemampuan Literasi SMP (Nilai)

Nilai Kemampuan Literasi SMP (Nilai) adalah skor yang menggambarkan tingkat kemampuan peserta didik sekolah dasar dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk mengembangkan pengetahuan serta berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperoleh Nilai Kemampuan Literasi SMP Tahun dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kemampuan Literasi SMP} = \frac{\text{Hasil Asesmen Nasional (AN) Peserta didik}}{\text{Jumlah Peserta}} \times 100 \%$$

Nilai Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemampuan peserta didik dalam memahami dan menggunakan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis bacaan. Nilai ini diperoleh dari hasil pelaksanaan Asesmen Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah sebagai bagian dari sistem evaluasi pendidikan nasional.

Dalam pelaksanaannya, kemampuan literasi diukur melalui komponen Asesmen Kompetensi Minimum yang menilai kemampuan membaca peserta didik dalam memahami, menganalisis, serta merefleksikan informasi dari teks. Hasil asesmen tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam Rapor Pendidikan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kompetensi literasi peserta didik pada jenjang sekolah dasar, baik di tingkat sekolah, daerah, maupun nasional.



Gambar 3. 6 Nilai Kemampuan Literasi SMP Tahun 2021 – 2025

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator Nilai Kemampuan Literasi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perkembangan yang cukup dinamis. Pada tahun 2022, realisasi nilai kemampuan literasi SMP tercatat sebesar 60,32. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dengan realisasi mencapai 83,56, yang menunjukkan adanya perbaikan yang cukup besar dalam capaian kompetensi literasi peserta didik. Namun demikian, pada tahun 2024 nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 78,31. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, nilai tersebut masih berada pada tingkat yang relatif baik dan tetap lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 83,59. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi yang dicapai juga sebesar 83,59 sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan secara tepat. Selain itu, capaian tersebut juga menunjukkan

peningkatan kembali dibandingkan realisasi tahun 2024 serta sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023.

Secara keseluruhan, perkembangan nilai kemampuan literasi SMP dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi awal pada tahun 2022. Keberhasilan mencapai target pada tahun 2025 mencerminkan adanya upaya yang konsisten dalam meningkatkan kualitas pembelajaran literasi di jenjang SMP sehingga kemampuan membaca, memahami, dan menganalisis informasi peserta didik semakin berkembang.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra pada indikator Nilai Kemampuan Literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan bahwa capaian kinerja berada sangat dekat dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, realisasi nilai kemampuan literasi SMP tercatat sebesar 83,59, sedangkan target akhir Renstra yang telah ditetapkan adalah sebesar 83,71.

Dengan demikian, realisasi tahun 2025 masih sedikit berada di bawah target akhir Renstra dengan selisih sebesar 0,12 poin. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target tersebut, selisih yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sudah berada pada tingkat yang sangat baik dan mendekati sasaran yang direncanakan.

Capaian ini juga mencerminkan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya dalam penguatan kompetensi literasi peserta didik pada jenjang SMP, telah berjalan secara cukup efektif. Oleh karena itu, dengan penguatan program peningkatan mutu pembelajaran yang berkelanjutan, diharapkan capaian nilai kemampuan literasi SMP pada periode berikutnya dapat melampaui target akhir Renstra yang telah ditetapkan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 pada indikator Nilai Kemampuan Literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Tanah Laut sebesar 83,59 berada pada posisi yang sangat baik dibandingkan dengan

beberapa daerah lain. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian Kabupaten Tanah Bumbu yang sebesar 75,71 serta Kabupaten Kotabaru sebesar 75,82.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Banjar yang mencapai 83,31, capaian Tanah Laut masih sedikit lebih tinggi. Selain itu, jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan yang tercatat sebesar 77,31, nilai kemampuan literasi SMP di Tanah Laut juga berada di atas rata-rata provinsi.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional Indonesia yang sebesar 72,07, capaian Tanah Laut menunjukkan selisih yang cukup signifikan dan berada jauh di atas angka nasional.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik pada jenjang SMP di Tanah Laut tergolong baik dan kompetitif. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan berbagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran literasi di tingkat SMP sehingga mampu melampaui sebagian besar daerah pembanding serta berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional.

g. Nilai Kemampuan Numerasi SD (Nilai)

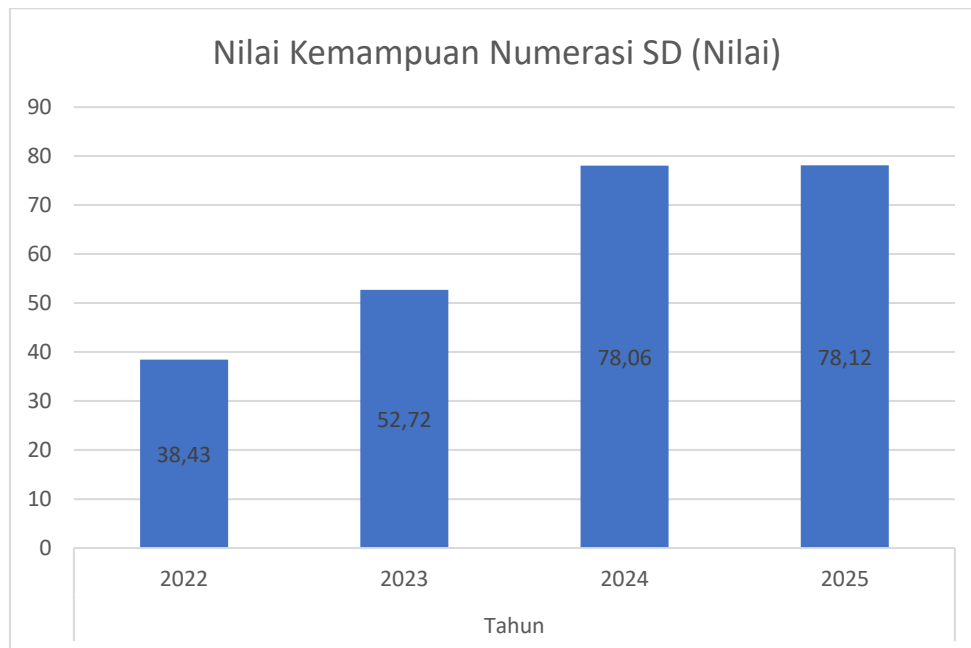
Nilai Kemampuan Numerasi SD (Nilai) adalah skor rata-rata yang menggambarkan tingkat kemampuan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dalam memahami, menggunakan, menafsirkan, dan menerapkan konsep-konsep matematika dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari.

Untuk memperoleh Nilai Kemampuan Numerasi SD Tahun dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kemampuan Numerasi SD} = \frac{\text{Hasil Asesmen Nasional (AN) Peserta didik}}{\text{Jumlah Peserta}} \times 100 \%$$

Nilai ini diperoleh dari hasil pelaksanaan Asesmen Nasional khususnya pada komponen Asesmen Kompetensi Minimum yang mengukur kompetensi numerasi peserta didik. Pengukuran tersebut menilai kemampuan siswa dalam berpikir logis, menganalisis informasi berbentuk angka, tabel, grafik, maupun data sederhana untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual.

Skor yang diperoleh kemudian diolah menjadi nilai rata-rata yang menggambarkan capaian kemampuan numerasi peserta didik pada jenjang sekolah dasar, baik pada tingkat sekolah, daerah, maupun nasional. Nilai ini digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas pembelajaran matematika dasar serta sebagai dasar dalam perencanaan dan peningkatan mutu pendidikan.



Gambar 3. 7 Grafik Nilai Kemampuan Numerasi SD Tahun 2022 – 2025

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator Nilai Kemampuan Numerasi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, realisasi nilai kemampuan numerasi SD tercatat sebesar 28,13. Nilai tersebut kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 41,78, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kemampuan peserta didik dalam memahami dan menerapkan konsep numerasi.

Peningkatan tersebut kembali berlanjut pada tahun 2024 dengan realisasi mencapai 54,71. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya dalam penguatan kompetensi numerasi pada jenjang sekolah dasar, mulai memberikan dampak yang positif terhadap hasil belajar peserta didik. Memasuki tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 54,74. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi yang dicapai sebesar 63,67 sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 116,31%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 tidak hanya

berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi juga menunjukkan peningkatan yang cukup besar dibandingkan capaian pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, perkembangan nilai kemampuan numerasi SD dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran numerasi, seperti penguatan metode pembelajaran berbasis pemecahan masalah dan pemanfaatan asesmen pendidikan, telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan numerasi peserta didik di tingkat sekolah dasar.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra pada indikator Nilai Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD) menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Pada tahun 2025, realisasi nilai kemampuan numerasi SD tercatat sebesar 63,67, sedangkan target akhir Renstra yang telah ditetapkan adalah sebesar 54,86.

Dengan demikian, realisasi tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra dengan selisih sebesar 8,81 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kemampuan numerasi peserta didik pada jenjang sekolah dasar telah berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang melampaui ekspektasi yang telah direncanakan. Keberhasilan ini juga mencerminkan adanya peningkatan kualitas proses pembelajaran, khususnya dalam penguatan kompetensi numerasi yang meliputi kemampuan memahami konsep matematika dasar, mengolah data, serta memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, capaian yang melampaui target akhir Renstra ini menjadi indikator positif bahwa program dan kebijakan yang dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar telah memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kemampuan numerasi peserta didik.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 pada indikator Nilai Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD) menunjukkan gambaran posisi capaian daerah

dibandingkan dengan kabupaten lain, tingkat provinsi, maupun nasional. Pada tahun 2025, nilai kemampuan numerasi SD di Kabupaten Tanah Laut tercatat sebesar 63,67. Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik dalam memahami konsep matematika dasar, menganalisis data sederhana, serta menyelesaikan permasalahan numerik dalam konteks kehidupan sehari-hari berada pada kategori cukup baik.

Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah yang sama, capaian Tanah Laut menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan Kabupaten Tanah Bumbu yang mencatat nilai 58,35. Selisih sebesar 5,32 poin ini menunjukkan bahwa tingkat penguasaan numerasi peserta didik SD di Tanah Laut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Tanah Bumbu. Selain itu, capaian Tanah Laut juga lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Kotabaru yang memperoleh nilai 61,46, dengan selisih sebesar 2,21 poin. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Tanah Laut berada di atas beberapa kabupaten pembanding dalam hal capaian numerasi pada jenjang sekolah dasar.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan Kabupaten Banjar yang mencapai nilai 72,68, capaian Tanah Laut masih berada di bawah dengan selisih sebesar 9,01 poin. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang peningkatan dalam upaya penguatan kompetensi numerasi peserta didik agar dapat menyamai capaian daerah yang memiliki nilai lebih tinggi.

Apabila dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi, rata-rata nilai kemampuan numerasi SD di Kalimantan Selatan tercatat sebesar 71,80. Dengan demikian, capaian Tanah Laut masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan selisih sebesar 8,13 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kemampuan numerasi peserta didik di Tanah Laut masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai rata-rata capaian provinsi.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional Indonesia yang sebesar 69,58, nilai kemampuan numerasi SD di Tanah Laut juga masih berada di bawah dengan selisih sebesar 5,91 poin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian Tanah Laut sudah melampaui beberapa kabupaten pembanding, namun secara keseluruhan masih diperlukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran numerasi agar dapat mendekati bahkan melampaui rata-rata nasional.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menggambarkan bahwa capaian kemampuan numerasi peserta didik SD di Tanah Laut berada pada posisi menengah di antara daerah pembanding. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program peningkatan mutu pembelajaran matematika, pemanfaatan hasil asesmen pendidikan sebagai dasar perbaikan pembelajaran, serta peningkatan kapasitas guru dalam mengembangkan

metode pembelajaran numerasi yang lebih kontekstual dan berbasis pemecahan masalah. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kemampuan numerasi peserta didik secara lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.

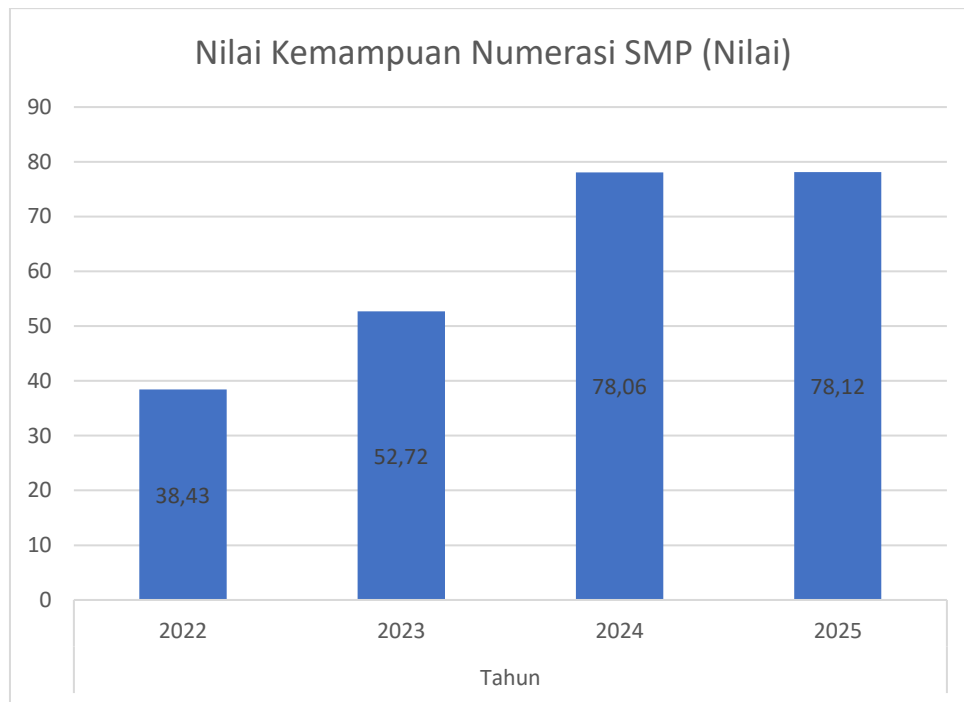
h. Nilai Kemampuan Numerasi SMP (Nilai)

Nilai Kemampuan Numerasi SD (Nilai) adalah skor rata-rata yang menggambarkan tingkat kemampuan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dalam memahami, menggunakan, menafsirkan, dan menerapkan konsep-konsep matematika dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Untuk memperoleh Nilai Kemampuan Numerasi SMP Tahun dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kemampuan Numerasi SMP} = \frac{\text{Hasil Asesmen Nasional (AN) Peserta didik}}{\text{Jumlah Peserta}} \times 100 \%$$

Nilai ini diperoleh dari hasil pelaksanaan Asesmen Nasional khususnya pada komponen Asesmen Kompetensi Minimum yang mengukur kompetensi numerasi peserta didik. Pengukuran tersebut menilai kemampuan siswa dalam berpikir logis, menganalisis informasi berbentuk angka, tabel, grafik, maupun data sederhana untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual.

Skor yang diperoleh kemudian diolah menjadi nilai rata-rata yang menggambarkan capaian kemampuan numerasi peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama, baik pada tingkat sekolah, daerah, maupun nasional. Nilai ini digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas pembelajaran matematika dasar serta sebagai dasar dalam perencanaan dan peningkatan mutu pendidikan.



Gambar 3. 8 Nilai Kemampuan Numerasi SMP Tahun 2022 – 2025

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator Nilai Kemampuan Numerasi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat positif dan cenderung meningkat secara signifikan. Pada tahun 2022, realisasi nilai kemampuan numerasi SMP tercatat sebesar 38,43. Nilai ini menggambarkan bahwa pada periode tersebut kemampuan peserta didik dalam memahami konsep numerasi, menganalisis data, serta menyelesaikan permasalahan matematika kontekstual masih berada pada tingkat yang relatif rendah.

Pada tahun 2023, capaian tersebut mengalami peningkatan menjadi 52,72, atau meningkat sebesar 14,29 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses pembelajaran matematika dan penguatan kompetensi numerasi peserta didik pada jenjang SMP. Berbagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran, seperti pemanfaatan hasil asesmen pendidikan, penguatan metode pembelajaran berbasis pemecahan masalah, serta peningkatan kompetensi guru, mulai memberikan dampak terhadap peningkatan hasil belajar siswa.

Peningkatan yang lebih signifikan kembali terjadi pada tahun 2024, di mana realisasi nilai kemampuan numerasi SMP mencapai 78,06. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi kenaikan sebesar 25,34 poin, yang menunjukkan adanya lompatan capaian yang cukup besar dalam kemampuan numerasi peserta didik. Hal ini

mengindikasikan bahwa upaya perbaikan kualitas pembelajaran numerasi telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang nyata terhadap peningkatan kompetensi siswa. Memasuki tahun 2025, target yang ditetapkan untuk indikator Nilai Kemampuan Numerasi SMP adalah sebesar 78,09. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 78,12, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,12%. Dengan demikian, capaian pada tahun 2025 tidak hanya berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga sedikit melampaui target tersebut dengan selisih 0,03 poin.

Secara keseluruhan, perkembangan nilai kemampuan numerasi SMP dari tahun 2022 hingga tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan. Jika dibandingkan dengan kondisi awal pada tahun 2022 yang hanya sebesar 38,43, capaian pada tahun 2025 yang mencapai 78,12 menunjukkan peningkatan sebesar 39,69 poin dalam kurun waktu empat tahun. Hal ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika serta penguatan kompetensi numerasi peserta didik pada jenjang SMP. Dengan capaian tersebut, diharapkan peningkatan kemampuan numerasi dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya melalui inovasi pembelajaran, penguatan kapasitas guru, serta pemanfaatan hasil asesmen pendidikan sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra pada indikator Nilai Kemampuan Numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan bahwa capaian kinerja berada sangat dekat dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, realisasi nilai kemampuan numerasi SMP tercatat sebesar 78,12, sedangkan target akhir Renstra yang telah ditetapkan adalah sebesar 78,21.

Dengan demikian, realisasi tahun 2025 masih sedikit berada di bawah target akhir Renstra dengan selisih sebesar 0,09 poin. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan, selisih tersebut tergolong sangat kecil sehingga capaian kinerja dapat dikatakan telah berada pada tingkat yang sangat baik dan hampir memenuhi sasaran akhir yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

Capaian ini juga menunjukkan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran numerasi pada jenjang SMP telah berjalan secara efektif, sehingga kemampuan peserta didik dalam memahami konsep matematika, menganalisis data, serta menyelesaikan permasalahan numerik dalam berbagai konteks kehidupan mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, hasil tersebut juga mencerminkan bahwa strategi peningkatan mutu pendidikan yang telah dilaksanakan mampu mendorong perbaikan kompetensi numerasi peserta didik secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, dengan penguatan program pembelajaran yang lebih inovatif, peningkatan kapasitas guru dalam pembelajaran numerasi, serta pemanfaatan hasil asesmen pendidikan sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran, diharapkan capaian nilai kemampuan numerasi SMP pada periode berikutnya dapat sepenuhnya mencapai bahkan melampaui target akhir Renstra yang telah ditetapkan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 pada indikator Nilai Kemampuan Numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan posisi capaian daerah dibandingkan dengan kabupaten lain, tingkat provinsi, maupun nasional. Pada tahun 2025, nilai kemampuan numerasi SMP di Kabupaten Tanah Laut tercatat sebesar 78,09. Nilai ini mencerminkan kemampuan peserta didik dalam memahami konsep matematika, menganalisis data, serta menerapkan penalaran numerik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kontekstual berada pada tingkat yang cukup baik.

Apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah yang sama, capaian Tanah Laut menunjukkan kinerja yang relatif lebih tinggi. Nilai tersebut lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Tanah Bumbu yang memperoleh nilai 71,31, dengan selisih sebesar 6,78 poin. Demikian pula jika dibandingkan dengan Kabupaten Kotabaru yang mencatat nilai 71,35, capaian Tanah Laut masih lebih tinggi dengan selisih 6,74 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan numerasi peserta didik pada jenjang SMP di Tanah Laut berada di atas beberapa kabupaten pembanding di wilayah yang sama.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan Kabupaten Banjar yang mencapai nilai 77,67, capaian Tanah Laut masih sedikit lebih tinggi dengan selisih 0,42 poin. Meskipun selisihnya tidak terlalu besar, kondisi ini menunjukkan bahwa Tanah Laut tetap mampu

mempertahankan posisi yang kompetitif dalam capaian kemampuan numerasi SMP dibandingkan dengan daerah tersebut.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata tingkat provinsi, nilai kemampuan numerasi SMP di Kalimantan Selatan tercatat sebesar 73,11. Dengan demikian, capaian Tanah Laut berada di atas rata-rata provinsi dengan selisih 4,98 poin. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kemampuan numerasi peserta didik SMP di Tanah Laut telah melampaui capaian rata-rata provinsi.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional di Indonesia yang sebesar 69,61, capaian Tanah Laut juga berada jauh di atas angka nasional dengan selisih 8,48 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas kemampuan numerasi peserta didik SMP di Tanah Laut secara umum telah berada pada tingkat yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menggambarkan bahwa capaian nilai kemampuan numerasi SMP di Tanah Laut berada pada posisi yang sangat baik dan kompetitif. Capaian tersebut tidak hanya lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten pembanding, tetapi juga telah melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Hal ini mencerminkan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran matematika serta penguatan kompetensi numerasi pada jenjang SMP telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan peserta didik di daerah tersebut.

3) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan “Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan”, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melaksanakan.

a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi SPM

1. Pembangunan dan revitalisasi gedung sekolah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu

layanan pendidikan sejak usia dini melalui penyediaan fasilitas yang memadai dan sesuai dengan standar.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan meliputi pembangunan pagar pada 13 satuan PAUD dan pembangunan paving blok pada 7 satuan PAUD guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Selain itu, pembangunan ruang belajar pada 8 satuan PAUD juga dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan ruang pembelajaran yang representatif. Untuk mendukung kesehatan dan kebersihan lingkungan, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dilaksanakan pada 2 satuan PAUD. Selanjutnya, pembangunan tempat bermain pada 4 satuan PAUD turut dilaksanakan sebagai sarana untuk mendukung perkembangan motorik, sosial, dan emosional anak melalui kegiatan bermain yang aman dan edukatif.

Di samping itu, rehabilitasi bangunan juga dilaksanakan pada 8 satuan PAUD untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fisik bangunan yang mengalami kerusakan agar kembali layak digunakan. Melalui pembangunan dan rehabilitasi tersebut, diharapkan kualitas layanan pendidikan PAUD semakin meningkat dan mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Pada jenjang Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung kelancaran proses pembelajaran. Kegiatan pembangunan meliputi pembangunan halaman sekolah pada 11 satuan pendidikan, pembangunan laboratorium pada 4 satuan pendidikan, pembangunan mushala pada 1 satuan pendidikan, serta pembangunan pagar sekolah pada 15 satuan pendidikan untuk meningkatkan keamanan lingkungan sekolah. Selain itu, pembangunan perpustakaan pada 4 satuan pendidikan dan pembangunan ruang guru, ruang kepala sekolah, serta ruang tata usaha pada 13 satuan pendidikan turut dilaksanakan guna mendukung kegiatan administrasi dan pembelajaran.

Selanjutnya, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 11 ruang kelas dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan ruang belajar yang memadai. Pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) pada 5 satuan pendidikan, pembangunan rumah dinas pada 1 satuan pendidikan, serta

pembangunan sarana air bersih dan sanitasi pada 4 satuan pendidikan juga dilaksanakan untuk mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang sehat dan layak.

Selain pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana juga dilaksanakan, meliputi rehabilitasi ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang tata usaha pada 2 satuan pendidikan, rehabilitasi 96 ruang kelas, rehabilitasi halaman sekolah pada 3 satuan pendidikan, serta rehabilitasi perpustakaan pada 3 satuan pendidikan. Rehabilitasi rumah dinas pada 4 satuan pendidikan dan rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi pada 3 satuan pendidikan juga dilaksanakan untuk memastikan seluruh fasilitas pendidikan dalam kondisi layak dan berfungsi dengan baik. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan Sekolah Dasar secara berkelanjutan.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan juga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Kegiatan pembangunan meliputi pembangunan fasilitas parkir pada 11 satuan pendidikan, pembangunan 1 ruang kelas baru, pembangunan laboratorium IPA pada 1 satuan pendidikan, dan pembangunan laboratorium komputer pada 2 satuan pendidikan untuk mendukung pembelajaran berbasis praktik dan teknologi. Selain itu, pembangunan fasilitas penunjang lainnya juga dilaksanakan, antara lain pemasangan paving pada 4 satuan pendidikan, pembangunan lapangan upacara pada 1 satuan pendidikan, pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) pada 5 satuan pendidikan, pembangunan kantin sekolah pada 6 satuan pendidikan, serta pembangunan ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang tata usaha pada 3 satuan pendidikan. Pembangunan rumah dinas pada 1 satuan pendidikan dan pembangunan pagar keliling pada 3 satuan pendidikan juga dilaksanakan untuk mendukung operasional dan keamanan sekolah. Selanjutnya, pembangunan tempat ibadah pada 1 satuan pendidikan, lapangan olahraga pada 2 satuan pendidikan, dan perpustakaan pada 1 satuan pendidikan dilaksanakan untuk mendukung penguatan karakter dan peningkatan literasi peserta didik.

Di samping kegiatan pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana juga dilaksanakan, meliputi rehabilitasi ruang kelas pada 25 satuan pendidikan,

rehabilitasi laboratorium bahasa pada 5 satuan pendidikan, rehabilitasi laboratorium IPA pada 2 satuan pendidikan, serta rehabilitasi paving halaman pada 2 satuan pendidikan. Selain itu, rehabilitasi ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang tata usaha pada 3 satuan pendidikan, rehabilitasi rumah dinas pada 5 satuan pendidikan, rehabilitasi tempat ibadah pada 1 satuan pendidikan, serta rehabilitasi perpustakaan pada 3 satuan pendidikan juga dilaksanakan untuk memastikan seluruh fasilitas pendidikan dalam kondisi layak dan berfungsi dengan baik.

Melalui pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada jenjang PAUD, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, diharapkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut dapat terus meningkat. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan mendukung proses pembelajaran yang efektif, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan warga sekolah, serta berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Berikut dokumentasi kegiatan Pembangunan dan revitalisasi Gedung Sekolah sebagai berikut :



Gambar 3. 9 Pembangunan dan revitalisasi gedung sekolah jenjang paud



Gambar 3. 10 Pembangunan dan revitalisasi gedung sekolah jenjang paud



Gambar 3. 11 Pembangunan dan revitalisasi gedung sekolah jenjang paud

2. Penyediaan infrastruktur digital berupa ChromeBook dan SmartBoard

Dalam rangka mendukung transformasi digital pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Pengadaan ini merupakan bagian dari upaya modernisasi sarana pembelajaran guna

mendukung implementasi kurikulum nasional serta meningkatkan kompetensi literasi digital peserta didik dan tenaga pendidik.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), telah dilaksanakan pengadaan Chromebook sebanyak 201 unit yang didistribusikan ke satuan pendidikan sebagai sarana pendukung pembelajaran berbasis digital. Ketersediaan perangkat ini membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran secara lebih interaktif, memanfaatkan berbagai sumber belajar digital, serta mendukung pelaksanaan asesmen berbasis teknologi. Selain itu, untuk memperkuat pembelajaran interaktif di kelas, juga dilaksanakan pengadaan Smartboard sebanyak 16 unit pada satuan pendidikan SD. Smartboard memungkinkan guru menyampaikan materi secara visual dan dinamis, sehingga dapat meningkatkan minat belajar, pemahaman peserta didik, serta menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan efektif sejak jenjang pendidikan dasar.

Selanjutnya, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dilaksanakan pengadaan Chromebook sebanyak 30 unit yang digunakan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi, pelaksanaan asesmen berbasis komputer, serta menunjang kegiatan pembelajaran yang inovatif dan efisien. Dengan tersedianya perangkat tersebut, diharapkan peserta didik dapat meningkatkan kemampuan literasi digital, mengakses berbagai sumber belajar secara mandiri, serta mempersiapkan diri dalam menghadapi perkembangan teknologi di era digital.

Melalui pengadaan Chromebook dan Smartboard pada jenjang SD dan SMP tersebut, diharapkan satuan pendidikan dapat melaksanakan proses pembelajaran yang lebih modern, adaptif, dan berkualitas, sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan serta mendukung pengembangan kompetensi peserta didik secara optimal.

Berikut dokumentasi kegiatan Penyediaan infrastruktur digital berupa ChromeBook dan SmartBoard sebagai berikut :



Gambar 3. 12 Infrastruktur digital ChromeBook dan SmartBoard jenjang sd



Gambar 3. 13 Infrastruktur digital ChromeBook dan SmartBoard SD



Gambar 3. 14 Infrastruktur digital ChromeBook dan SmartBoard jenjang sd

3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut secara berkelanjutan melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang meliputi koordinasi, perencanaan, supervisi, evaluasi, bimbingan teknis, pelatihan, serta sosialisasi berbagai program pendidikan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia pendidikan, baik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan, pendidikan nonformal, Sekolah Dasar, maupun Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Sepanjang tahun pelaksanaan program, telah dilaksanakan sebanyak 24 kegiatan yang melibatkan total 2.401 peserta yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, pengelola satuan pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan tersebut mencakup bimbingan teknis peningkatan kapasitas, bimbingan teknis inklusi PAUD, pelatihan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik, serta pengembangan konten digital pendidikan PAUD yang diikuti oleh 105 peserta. Selain itu, kegiatan koordinasi, supervisi, dan evaluasi juga dilaksanakan untuk

memastikan kualitas implementasi program pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Upaya peningkatan kapasitas juga diperkuat melalui berbagai kegiatan sosialisasi program strategis, seperti sosialisasi Dapodik yang diikuti oleh 206 peserta, sosialisasi advokasi PAUD dengan jumlah peserta mencapai 400 orang, serta sosialisasi kegiatan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH) yang diikuti oleh 800 peserta. Tingginya partisipasi pada kegiatan tersebut menunjukkan komitmen dan antusiasme yang kuat dari para pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kompetensi serta kualitas layanan pendidikan. Selain itu, berbagai kegiatan lain seperti sosialisasi kualitas layanan PAUD, PAUD Holistik Integratif, pembelajaran mendalam (deep learning), sekolah sehat, serta transisi PAUD ke SD turut dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman dan implementasi kebijakan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Bimbingan teknis terkait Tes Kemampuan Akademik (TKA) pendidikan kesetaraan dan nonformal juga dilaksanakan guna meningkatkan kesiapan satuan pendidikan dalam mendukung sistem evaluasi pendidikan yang berkualitas.

Pada jenjang Sekolah Dasar, berbagai kegiatan strategis telah dilaksanakan yang mencakup bimbingan teknis, penguatan kurikulum, serta peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme pendidik dan efektivitas pengelolaan satuan pendidikan. Pada aspek pengelolaan satuan pendidikan, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diikuti oleh 246 peserta yang terdiri dari bendahara BOS dari unsur pendidik maupun tenaga kependidikan dan dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut. Selain itu, dilaksanakan pula Bimbingan Teknis Perencanaan Berbasis Data yang diikuti oleh 246 peserta dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan yang bertempat di Ruang Belajar SKB, dengan tujuan meningkatkan kemampuan satuan pendidikan dalam menyusun perencanaan berbasis data yang akurat, efektif, dan terukur.

Upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah juga dilakukan melalui Bimbingan Teknis Deep Learning yang diikuti oleh 248 kepala sekolah,

yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep pembelajaran mendalam sebagai pendekatan yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif peserta didik. Selanjutnya, peningkatan kompetensi guru dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis Pembuatan Konten Digital yang diikuti oleh 86 guru serta Bimbingan Teknis Penguatan Pendidikan Karakter yang diikuti oleh 102 guru, yang keduanya dilaksanakan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung transformasi pembelajaran berbasis teknologi serta memperkuat pembentukan karakter peserta didik.

Sejalan dengan upaya tersebut, Bidang Sekolah Menengah Pertama juga melaksanakan berbagai kegiatan bimbingan teknis guna meningkatkan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, serta peserta didik. Pada aspek pengelolaan keuangan satuan pendidikan, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana BOS yang diikuti oleh 58 peserta yang terdiri dari bendahara BOS dari unsur pendidik maupun tenaga kependidikan, yang dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut. Selain itu, dilaksanakan pula Bimbingan Teknis Perencanaan Berbasis Data yang diikuti oleh 60 kepala sekolah dan dilaksanakan di Ruang Belajar SKB, dengan tujuan meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam menyusun perencanaan pendidikan yang berbasis data dan berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah juga diperkuat melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Deep Learning yang diikuti oleh 120 kepala sekolah dan dilaksanakan di Hotel Roditha Banjarbaru. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepala sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam secara efektif di satuan pendidikan. Selain itu, peningkatan kompetensi guru juga dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis Pengembangan Konten Digital yang diikuti oleh 120 guru dan dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut serta Aula SKB Pelaihari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran yang inovatif dan interaktif.

Tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, Bidang Sekolah Menengah Pertama juga melaksanakan Bimbingan Teknis Wawasan Kebangsaan yang diikuti oleh 60 peserta didik dan dilaksanakan di UPTD SMP Negeri 2 Pelaihari. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat karakter peserta didik, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta membentuk generasi muda yang memiliki sikap nasionalisme, disiplin, dan tanggung jawab.

Secara keseluruhan, pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut menunjukkan komitmen kuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan secara komprehensif dan berkelanjutan. Melalui peningkatan kompetensi, penguatan kurikulum, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta penguatan karakter peserta didik, diharapkan mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Tanah Laut dapat terus meningkat dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.

Berikut dokumentasi kegiatan Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang sebagai berikut :



Gambar 3. 15 Bimbingan teknis deep learning PAUD



Gambar 3. 16 Bimbingan Teknis Deep Learning SD



Gambar 3. 17 Bimbingan Teknis Deep Learning SMP

4. Pemberian beasiswa bagi peserta didik

Dalam rangka mendukung keberlangsungan pendidikan serta meningkatkan motivasi belajar peserta didik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan program pemberian beasiswa melalui Bidang Sekolah Dasar bagi peserta didik Sekolah Dasar

Negeri di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Program ini diberikan kepada sebanyak 1.410 siswa sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam membantu peserta didik, khususnya yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan.

Pemberian beasiswa ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi orang tua atau wali peserta didik, serta memastikan peserta didik tetap dapat mengikuti proses pendidikan secara optimal tanpa terkendala faktor ekonomi. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar, mendorong prestasi peserta didik, serta mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar. Melalui program ini, peserta didik diharapkan memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan prestasi akademik, serta berkontribusi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Sejalan dengan upaya tersebut, Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga melaksanakan program pemberian beasiswa bagi peserta didik yang bersekolah di SMP Negeri di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan keberlangsungan pendidikan pada jenjang SMP, khususnya bagi peserta didik yang membutuhkan dukungan pembiayaan pendidikan agar tetap dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal.

Pada tahun pelaksanaan, program pemberian beasiswa pada jenjang SMP telah diberikan kepada sebanyak 268 siswa yang tersebar pada SMP Negeri. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik, mengurangi potensi angka putus sekolah, serta memperluas pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, program pemberian beasiswa ini menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Berikut dokumentasi kegiatan Pemberian beasiswa bagi peserta didik sebagai berikut :



Gambar 3. 18 Pemberian Beasiswa Jenjang SMP



Gambar 3. 19 Pemberian Beasiswa Jenjang Sd

5. Pemberian perlengkapan peserta didik

Dalam rangka mendukung kelancaran proses pembelajaran serta meningkatkan kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan program pemberian bantuan perlengkapan peserta didik melalui Bidang

Sekolah Dasar dan Bidang Sekolah Menengah Pertama. Program ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan dukungan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar peserta didik, khususnya bagi mereka yang membutuhkan dukungan untuk menunjang kegiatan belajar di sekolah.

Melalui Bidang Sekolah Dasar, program pemberian bantuan perlengkapan peserta didik telah diberikan kepada sebanyak 2.044 siswa yang bersekolah di Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Bantuan ini bertujuan untuk membantu peserta didik agar memiliki perlengkapan sekolah yang memadai sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal tanpa terkendala oleh keterbatasan sarana penunjang pendidikan.

Sejalan dengan hal tersebut, Bidang Sekolah Menengah Pertama juga melaksanakan program pemberian bantuan perlengkapan peserta didik bagi siswa yang bersekolah di SMP Negeri di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun pelaksanaan, bantuan ini telah diberikan kepada sebanyak 116 siswa. Program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah peserta didik serta mendukung kelancaran proses pembelajaran pada jenjang SMP.

Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik, mendukung pemerataan akses pendidikan, serta mengurangi kendala yang dihadapi peserta didik dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah. Selain itu, program ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan.



GAMBAR 3. 20 PEMBERIAN PERLENGKAPAN SEKOLAH JENJANG SMP



Gambar 3. 21 pemberian perlengkapan sekolah jenjang sd

6. Peningkatan kualitas kurikulum pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan serta memperkuat mutu pembelajaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan berbagai kegiatan bimbingan teknis yang berfokus pada pengembangan dan penyempurnaan kurikulum di satuan pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Bidang Sekolah Dasar dan Bidang Sekolah Menengah Pertama sebagai upaya

meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik daerah.

Melalui Bidang Sekolah Dasar, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dan penyusunan silabus muatan lokal yang melibatkan sebanyak 246 sekolah dengan peserta dari unsur guru. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Belajar SKB dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun kurikulum dan silabus muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah, kebutuhan peserta didik, serta potensi lingkungan setempat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan guru mampu mengembangkan kurikulum yang kontekstual dan relevan guna mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.

Sejalan dengan upaya tersebut, Bidang Sekolah Menengah Pertama juga melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dan penyusunan silabus muatan lokal dengan mengundang sebanyak 60 sekolah dan diikuti oleh peserta dari unsur guru. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menyusun dokumen kurikulum muatan lokal yang sistematis, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada jenjang SMP.

Melalui pelaksanaan bimbingan teknis ini, diharapkan para guru pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum muatan lokal secara efektif. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Tanah Laut secara berkelanjutan.

Berikut dokumentasi kegiatan Peningkatan kualitas kurikulum pendidikan pada semua jenjang sebagai berikut :



Gambar 3. 22 bimbingan teknis kurikulum



Gambar 3. 23 bimbingan teknis kurikulum



Gambar 3. 24 bimbingan teknis kurikulum

7. Penguatan literasi dan numerasi

Selain itu, Bidang Sekolah Dasar juga melaksanakan Bimbingan Teknis Kurikulum Nasional yang diikuti oleh sebanyak 101 guru dan dilaksanakan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini membahas penguatan literasi dan numerasi sebagai kompetensi dasar yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta mendukung implementasi kurikulum nasional secara efektif di satuan pendidikan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para guru memiliki pemahaman dan keterampilan yang lebih baik dalam mengintegrasikan literasi dan numerasi ke dalam proses pembelajaran.

Sejalan dengan hal tersebut, Bidang Sekolah Menengah Pertama juga melaksanakan Bimbingan Teknis Strategi Implementasi Kurikulum Nasional yang diikuti oleh sebanyak 120 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dan membahas strategi penguatan literasi dan numerasi sebagai bagian penting dalam implementasi kurikulum nasional di satuan pendidikan.



Gambar 3. 27 penguatan literasi dan numerasi

8. Pengembangan potensi dan karakter peserta didik

Dalam rangka mendukung pengembangan potensi, minat, bakat, serta pembentukan karakter peserta didik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan berbagai kegiatan kompetisi akademik, olahraga, dan seni di tingkat kabupaten melalui Bidang Sekolah Dasar dan Bidang Sekolah Menengah Pertama. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi peserta didik dalam mengekspresikan kemampuan, meningkatkan kepercayaan diri, serta menumbuhkan semangat berprestasi dan sportivitas sejak dini di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Melalui Bidang Sekolah Dasar, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat kabupaten yang diselenggarakan secara daring dengan jumlah pendaftar hampir 300 siswa. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan akademik peserta didik, khususnya dalam bidang sains, serta mendorong terciptanya budaya belajar yang kompetitif dan inovatif. Selain itu, dilaksanakan pula Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan di Pelaihari dengan jumlah peserta sebanyak 110 siswa yang mengikuti 5 cabang olahraga. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran

jasmani, menanamkan nilai sportivitas, serta membentuk karakter disiplin dan kerja sama.

Selanjutnya, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS3N) tingkat kabupaten juga dilaksanakan secara daring dengan jumlah pendaftar hampir 300 siswa. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas, mengekspresikan bakat seni, serta memperkuat karakter percaya diri dan apresiasi terhadap seni dan budaya. Melalui pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, diharapkan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar tidak hanya berkembang dari sisi akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kreatif, dan berdaya saing.

Sejalan dengan hal tersebut, Bidang Sekolah Menengah Pertama juga melaksanakan berbagai kegiatan kompetisi sebagai upaya pengembangan potensi peserta didik. Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat kabupaten pada jenjang SMP dilaksanakan secara daring dengan jumlah pendaftar hampir 150 siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan akademik peserta didik serta mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di bidang sains.

Selain itu, Bidang Sekolah Menengah Pertama juga melaksanakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan di Pelaihari sesuai dengan tempat pelaksanaan lomba, dengan jumlah peserta sebanyak 130 siswa yang mengikuti 5 cabang olahraga. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, membentuk karakter disiplin, serta menanamkan nilai sportivitas dan kerja sama di kalangan peserta didik. Selanjutnya, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS3N) tingkat kabupaten pada jenjang SMP juga dilaksanakan secara luring dengan jumlah pendaftar hampir 300 siswa. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk menyalurkan bakat dan kreativitas di bidang seni serta meningkatkan rasa percaya diri dan apresiasi terhadap seni dan budaya.

Melalui pelaksanaan berbagai kegiatan kompetisi pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, diharapkan peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik dari segi akademik, olahraga, maupun seni. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu membentuk karakter

peserta didik yang kreatif, disiplin, berprestasi, dan berdaya saing sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh di Kabupaten Tanah Laut.

Berikut dokumentasi kegiatan pengembangan dan potensi peserta didik sebagai berikut :



Gambar 3. 28 lomba kreatifitas siswa berbahasa banjar



GAMBAR 3. 29 LOMBA KREATIFITAS SISWA BERBAHASA BANJAR



GAMBAR 3. 30 OLIMPIADE SISWA NASIONAL SMP

4) Faktor Pendorong/Keberhasilan Bidang Pendidikan

1. Dukungan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan. Ketersediaan ruang belajar yang layak, perangkat pembelajaran berbasis teknologi, serta fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Kondisi ini memungkinkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara lebih optimal.

2. Komitmen Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Keberhasilan capaian indikator pendidikan juga tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program dan kebijakan strategis. Dukungan kebijakan, perencanaan program yang terarah, serta pengalokasian sumber daya yang memadai menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan di daerah.

3. Pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi guru

bimbingan teknis, pelatihan, serta pendampingan implementasi kurikulum yang menekankan pada penguatan literasi dan numerasi. Kegiatan-kegiatan tersebut memberikan bekal kepada guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif.

4. Pemberian beasiswa kepada peserta didik.

Program beasiswa memberikan motivasi tambahan bagi peserta didik untuk belajar lebih giat serta membantu meringankan beban ekonomi keluarga, sehingga peserta didik dapat lebih fokus dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Dengan adanya dukungan tersebut, kesempatan belajar menjadi lebih merata dan potensi akademik peserta didik dapat berkembang secara optimal.

5. Penyediaan perlengkapan peserta didik.

penyediaan perlengkapan peserta didik seperti buku tulis, alat tulis, tas sekolah, dan perlengkapan belajar lainnya turut mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Ketersediaan perlengkapan belajar yang memadai memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki sarana dasar yang dibutuhkan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.

5) Faktor Penghambat/Kegagalan Bidang Pendidikan

1. Dukungan lingkungan keluarga terhadap kegiatan belajar peserta didik juga masih bervariasi.

Tidak semua peserta didik memperoleh pendampingan belajar yang memadai di rumah, baik karena keterbatasan waktu orang tua maupun karena keterbatasan pemahaman orang tua terhadap materi pembelajaran. Kondisi ini dapat memengaruhi kebiasaan membaca, kemampuan memahami informasi, serta kemampuan berpikir logis peserta didik.

2. Anak Tidak Sekolah

Proses verifikasi dan validasi Anak Tidak Sekolah (ATS) secara by name by address memerlukan waktu yang relatif lama karena melibatkan koordinasi lintas sektor dengan berbagai pihak. Dalam pelaksanaannya, proses verifikasi tidak hanya dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan, tetapi juga membutuhkan dukungan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan sebagai pihak yang

memiliki kewenangan dan pemahaman langsung terhadap kondisi wilayah serta data kependudukan masyarakat setempat.

3. Keterbatasan pemanfaatan bahan bacaan yang berkualitas.

Meskipun sebagian sekolah telah memiliki perpustakaan atau pojok baca, pemanfaatannya belum optimal. Ketersediaan bahan bacaan yang menarik, kontekstual, dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung penguatan literasi.

4. Variasi kemampuan dasar peserta didik

Peserta didik memiliki kemampuan awal yang berbeda-beda dalam memahami bacaan maupun konsep numerasi. Perbedaan kemampuan ini sering kali menjadi tantangan bagi guru dalam memberikan pembelajaran yang mampu menjangkau seluruh peserta didik secara optimal.

5. Bersekolah di lembaga pendidikan yang belum terdaftar dalam sistem pendataan pendidikan Nasional

masih adanya orang tua yang menyekolahkan anaknya di pesantren salafiah yang belum terdaftar dalam sistem pendataan pendidikan nasional, baik pada aplikasi EMIS maupun Dapodik. Kondisi ini menyebabkan anak-anak yang sebenarnya sedang menempuh pendidikan di lembaga tersebut tetap terdeteksi sebagai Anak Tidak Sekolah pada aplikasi Verval ATS.

6) Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. Penguatan Program Literasi dan Numerasi di Lingkungan Sekolah

Menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pembiasaan literasi dan numerasi. Mengadakan kegiatan lomba membaca, menulis, dan pemecahan masalah numerasi. Mengintegrasikan kegiatan literasi dan numerasi dalam berbagai mata pelajaran.

2. Rapat koordinasi lintas sektor

Pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak terkait. Rapat koordinasi ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta mempercepat proses verifikasi dan validasi data ATS secara by name by address. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta instansi terkait

lainnya yang memiliki keterkaitan dengan data kependudukan dan kondisi sosial masyarakat.

3. Penyediaan bahan bacaan yang berkualitas

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan fungsi perpustakaan sekolah dan pojok baca sebagai pusat kegiatan literasi yang aktif, tidak hanya sebagai tempat penyimpanan buku. Sekolah dapat melakukan penambahan dan pembaruan koleksi bahan bacaan yang menarik, kontekstual, serta sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik agar dapat meningkatkan minat membaca. Selain itu, guru juga perlu mengintegrasikan kegiatan membaca dalam proses pembelajaran, misalnya melalui program pembiasaan membaca sebelum pelajaran dimulai, kegiatan membaca terpandu, serta penugasan yang mendorong peserta didik untuk memanfaatkan berbagai sumber bacaan.

4. Penerapan Pembelajaran Diferensiasi untuk Mengakomodasi Perbedaan Kemampuan Peserta Didik

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi, yaitu pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan metode, materi, maupun tingkat kesulitan tugas dengan kemampuan awal peserta didik. Dengan demikian, peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi tetap dapat berkembang secara optimal, sementara peserta didik yang masih mengalami kesulitan dapat memperoleh pendampingan yang lebih intensif. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara bulanan maupun triwulanan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi untuk segera diselesaikan.

5. Penguatan Kerja Sama dengan Kementerian Agama dalam Penanganan Peserta Didik pada Pesantren Salafiah

Untuk mengatasi permasalahan masih adanya peserta didik yang bersekolah di lembaga pendidikan yang belum terdaftar dalam sistem pendataan pendidikan nasional, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan kerja sama dengan Kementerian Agama. Kerja sama ini dapat diwujudkan melalui penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) antara pemerintah daerah dengan Kantor Kementerian Agama setempat

dalam rangka melakukan pendekatan dan pembinaan kepada pesantren salafiah yang belum terintegrasi dengan sistem pendataan pendidikan nasional.

Melalui kerja sama tersebut, diharapkan dapat dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola pesantren salafiah agar dapat menyelenggarakan layanan pendidikan kesetaraan, seperti Program Paket A, Paket B, dan Paket C, sehingga peserta didik yang menempuh pendidikan di pesantren tetap dapat tercatat dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, langkah ini juga bertujuan agar peserta didik memperoleh pengakuan secara administratif terhadap proses pendidikan yang dijalani serta dapat tercatat dalam sistem pendataan pendidikan seperti EMIS atau sistem pendataan lainnya yang relevan.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 4390 ASN pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan serta di dukung oleh 2 Program dengan Pagu Rp. 657.384.937.676,64 dan terealisasi Rp. 600.564.066.773,40 atau sebesar 91,36%

Tabel 3. 8 Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	475.972.145.482,82	439.022.520.512,00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	181.412.792.193,82	161.541.546.261,40
	JUMLAH	657.384.937.676,64	600.564.066.773,40

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 – 6 Tahun

$$\text{Efisiensi} = \frac{(29.394.334.681,09 \times 93,11 \%) - 24.192.314.772,00}{(29.394.334.681,09 \times 93,11 \%) } \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 11,61\%$$

Tabel 3. 9 Efisiensi Sasaran Strategis 1 Indikator 1

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
93,11%	82,30%	11,61%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun, diketahui bahwa realisasi kinerja mencapai 93,11%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 82,30% dari total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terkait peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar target yang telah ditetapkan dalam upaya meningkatkan partisipasi sekolah anak usia 5–6 tahun berhasil dicapai dengan baik.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun merupakan indikator yang menggambarkan persentase anak pada kelompok usia tersebut yang telah mengikuti layanan pendidikan, khususnya pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seperti taman kanak-kanak, kelompok bermain, maupun satuan PAUD sejenis. Dengan capaian kinerja sebesar 93,11%, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak usia 5–6 tahun di wilayah tersebut telah memperoleh akses terhadap

layanan pendidikan usia dini, meskipun masih terdapat sebagian kecil anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan tersebut.

Sementara itu, realisasi keuangan sebesar 82,30% menunjukkan bahwa pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan APS, seperti sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini, pembinaan lembaga PAUD, peningkatan kapasitas pendidik, serta dukungan sarana dan prasarana, dapat dilaksanakan dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang telah direncanakan.

Perbandingan antara realisasi kinerja dan realisasi keuangan tersebut menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 11,61%. Nilai efisiensi ini menggambarkan bahwa capaian kinerja yang cukup tinggi dapat diperoleh dengan pemanfaatan anggaran yang relatif lebih hemat. Dengan kata lain, program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan partisipasi sekolah anak usia 5–6 tahun tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang tersedia.

Efisiensi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain optimalisasi pelaksanaan program, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif, serta adanya dukungan dari masyarakat dan lembaga pendidikan dalam mendorong partisipasi anak usia dini untuk mengikuti layanan pendidikan. Selain itu, berbagai upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat juga berperan penting dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan bagi anak usia dini.

Secara keseluruhan, capaian realisasi kinerja sebesar 93,11% dengan realisasi keuangan sebesar 82,30% menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun telah berjalan dengan cukup baik dan efisien. Meskipun demikian, upaya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan anak usia dini tetap perlu terus dilakukan agar seluruh anak pada kelompok usia tersebut dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti

pendidikan sejak dini sebagai fondasi penting bagi keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya.

2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 12 Tahun

$$\text{Efisiensi} = \frac{(104.020.640.430,68 \times 100,20 \%) - 94.198.471.981,83}{(104.020.640.430,68 \times 100,20 \%)}$$

X 100%

$$\text{Efisiensi} = 9,62\%$$

Tabel 3. 10 Efisiensi Sasaran Strategis 1 Indikator 2

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,20%	90,56%	9,62%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun, diketahui bahwa realisasi kinerja mencapai 100,20%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 90,56% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan dalam upaya meningkatkan partisipasi sekolah pada kelompok usia pendidikan dasar tidak hanya tercapai, tetapi juga melampaui target yang direncanakan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun merupakan indikator yang menggambarkan persentase anak pada kelompok usia tersebut yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, khususnya Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat. Capaian kinerja sebesar 100,20% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia 7–12 tahun telah terjangkau oleh layanan pendidikan, bahkan terdapat peningkatan partisipasi yang melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan dasar telah berjalan dengan sangat baik. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, seperti peningkatan akses layanan pendidikan dasar, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, dukungan terhadap program wajib belajar, pembinaan dan penguatan manajemen sekolah, serta berbagai kegiatan sosialisasi kepada

masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar bagi anak. Selain itu, adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sekolah, orang tua, dan masyarakat, turut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi sekolah pada kelompok usia tersebut.

Sementara itu, realisasi keuangan sebesar 90,56% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang telah dialokasikan. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara cukup efektif dengan tetap memperhatikan pencapaian hasil yang optimal.

Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi keuangan tersebut menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 9,62%. Nilai efisiensi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan capaian kinerja yang sangat baik dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih hemat. Dengan kata lain, target kinerja dapat dicapai bahkan dilampaui tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang tersedia.

Secara keseluruhan, capaian realisasi kinerja sebesar 100,20% dengan realisasi keuangan sebesar 90,56% menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun telah berjalan secara efektif dan efisien. Ke depan, upaya peningkatan dan pemerataan akses pendidikan dasar perlu terus dilakukan agar seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 Tahun

$$\text{Efisiensi} = \frac{(40.710.289.321,43 \times 99,31 \%) - 36.584.774.987,61}{(40.710.289.321,43 \times 99,31 \%) } \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 9,51\%$$

Tabel 3. 11 Efisiensi Sasaran Strategis 1 Indikator 3

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
99,31%	89,87%	9,51%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13–15 tahun, diketahui bahwa realisasi kinerja mencapai 99,31%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 89,87% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh target yang telah ditetapkan dalam upaya meningkatkan partisipasi pendidikan pada kelompok usia pendidikan menengah pertama dapat direalisasikan dengan sangat baik.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13–15 tahun merupakan indikator yang menggambarkan persentase anak pada kelompok usia tersebut yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Dengan capaian kinerja sebesar 99,31%, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak usia 13–15 tahun telah memperoleh akses terhadap layanan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama. Meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya mencapai 100%, namun nilai tersebut menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong akses pendidikan pada jenjang tersebut telah berjalan dengan optimal.

Capaian ini tidak terlepas dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung peningkatan partisipasi sekolah, seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah, pelaksanaan program wajib belajar, pemberian dukungan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah pertama. Selain itu, peran aktif sekolah, orang tua, serta dukungan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendorong anak usia sekolah untuk tetap melanjutkan pendidikan.

Sementara itu, realisasi keuangan sebesar 89,87% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung

peningkatan APS usia 13–15 tahun dapat dilaksanakan dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang telah direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif dengan tetap mengutamakan pencapaian hasil yang optimal.

Perbandingan antara realisasi kinerja dan realisasi keuangan tersebut menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 9,51%. Nilai efisiensi ini menggambarkan bahwa capaian kinerja yang tinggi dapat diraih dengan penggunaan sumber daya keuangan yang relatif lebih hemat. Dengan kata lain, pelaksanaan program dan kegiatan telah mampu menghasilkan hasil yang maksimal tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang tersedia.

Secara keseluruhan, capaian realisasi kinerja sebesar 99,31% dengan realisasi keuangan sebesar 89,87% menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13–15 tahun telah berjalan dengan baik dan efisien. Ke depan, upaya peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan pada jenjang menengah pertama perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam menjangkau anak-anak yang masih berpotensi tidak melanjutkan sekolah, sehingga seluruh anak usia 13–15 tahun dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas.

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Tahun

$$\text{Efisiensi} = \frac{(7.287.527.760,62 \times 103,96 \%) - 6.565.984.519,96}{(7.287.527.760,62 \times 103,96 \%) } \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 13,33\%$$

Tabel 3. 12 Efisiensi Sasaran Strategis 1 Indikator 4

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
103,96%	90,10%	13,33%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun pada pendidikan kesetaraan, diketahui

bahwa realisasi kinerja mencapai 103,96%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 90,10% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan tidak hanya tercapai, tetapi juga melampaui target yang direncanakan, sehingga menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program pendidikan kesetaraan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan alternatif.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun pada pendidikan kesetaraan merupakan indikator yang menggambarkan persentase penduduk pada kelompok usia tersebut yang mengikuti layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal, seperti Program Paket A, Paket B, dan Paket C, yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun lembaga pendidikan nonformal lainnya. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada anak-anak dan remaja yang belum atau tidak dapat mengikuti pendidikan formal agar tetap memperoleh layanan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal.

Capaian realisasi kinerja sebesar 103,96% menunjukkan bahwa program pendidikan kesetaraan mampu menjangkau peserta didik lebih banyak dari yang telah ditargetkan. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, serta keberhasilan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara pendidikan nonformal dalam memperluas akses layanan pendidikan bagi anak dan remaja yang berada di luar sistem pendidikan formal.

Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai program dan kegiatan, seperti penguatan kelembagaan PKBM, peningkatan kapasitas tutor pendidikan kesetaraan, penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Selain itu, adanya kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan nonformal, serta dukungan masyarakat turut berperan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan melalui jalur kesetaraan.

Sementara itu, realisasi keuangan sebesar 90,10% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang telah dialokasikan. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif dengan tetap mengutamakan pencapaian hasil yang optimal.

Perbandingan antara realisasi kinerja dan realisasi keuangan tersebut menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 13,33%. Nilai efisiensi ini menggambarkan bahwa capaian kinerja yang sangat baik dapat diraih dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih hemat. Dengan kata lain, program pendidikan kesetaraan mampu menghasilkan hasil yang melampaui target dengan pemanfaatan sumber daya keuangan yang efisien.

Secara keseluruhan, capaian realisasi kinerja sebesar 103,96% dengan realisasi keuangan sebesar 90,10% menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun pada pendidikan kesetaraan telah berjalan secara efektif dan efisien. Ke depan, upaya peningkatan akses pendidikan melalui jalur kesetaraan perlu terus diperkuat agar semakin banyak anak dan remaja yang sebelumnya tidak terjangkau oleh pendidikan formal dapat memperoleh kesempatan belajar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

5. Nilai Kemampuan Literasi SD (Nilai)

$$\text{Efisiensi} = \frac{(104.020.640.430,68 \times 101,34\%) - 94.198.471.981,83}{(104.020.640.430,68 \times 101,34\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 10,64%

Tabel 3. 13 Efisiensi Sasaran Strategis 1 Indikator 5

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
101,34%	90,56%	10,64%

Pada indikator Nilai Kemampuan Literasi SD, capaian kinerja pada tahun pelaporan menunjukkan hasil yang sangat baik. Realisasi kinerja

tercatat sebesar 101,34% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kemampuan literasi peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar telah terlaksana secara optimal sehingga mampu melampaui target yang direncanakan. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama satuan pendidikan, seperti penguatan implementasi kurikulum, peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran literasi, pemanfaatan bahan bacaan yang lebih beragam, serta pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung budaya literasi di sekolah.

Dari sisi penggunaan anggaran, realisasi keuangan untuk mendukung pencapaian indikator ini tercatat sebesar 90,56% dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan berbagai program peningkatan literasi di sekolah dasar. Meskipun demikian, masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sepenuhnya yang antara lain disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta adanya penyesuaian kebutuhan kegiatan di lapangan.

Dengan capaian kinerja sebesar 101,34% dan realisasi keuangan sebesar 90,56%, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 10,64%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan literasi peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih hemat dibandingkan dengan perencanaan awal. Hal ini mencerminkan adanya pengelolaan program dan kegiatan yang cukup efisien, dimana sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan kinerja yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, capaian indikator Nilai Kemampuan Literasi SD menggambarkan bahwa pelaksanaan program peningkatan literasi di sekolah dasar telah berjalan dengan efektif dan efisien. Ke depan, upaya penguatan budaya literasi, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penyediaan sarana pendukung literasi perlu terus dilakukan agar capaian yang telah diperoleh dapat dipertahankan dan ditingkatkan

secara berkelanjutan sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar secara menyeluruh.

6. Nilai Kemampuan Literasi SMP (Nilai)

$$\text{Efisiensi} = \frac{(40.710.289.321,43 \times 100\%) - 36.584.774.987,61}{(40.710.289.321,43 \times 100\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 10,33%

Tabel 3. 14 Efisiensi Sasaran Strategis 1 Indikator 6

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	89,87%	10,13%

Pada indikator Nilai Kemampuan Literasi SMP, capaian kinerja pada tahun pelaporan menunjukkan hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kemampuan literasi peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama telah terlaksana secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Pencapaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung penguatan literasi di lingkungan sekolah, seperti peningkatan kualitas pembelajaran berbasis literasi, penguatan kompetensi guru dalam strategi pembelajaran literasi, pemanfaatan berbagai sumber belajar, serta pengembangan budaya membaca melalui berbagai kegiatan literasi di satuan pendidikan.

Dari sisi penggunaan anggaran, realisasi keuangan untuk mendukung pencapaian indikator ini tercatat sebesar 89,87% dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan literasi pada jenjang SMP. Sisa anggaran yang tidak terserap sepenuhnya antara lain disebabkan oleh adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah tersedia, serta penyesuaian kebutuhan kegiatan di lapangan sehingga penggunaan anggaran dapat

dilakukan secara lebih hemat tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program.

Dengan capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,87%, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 10,13%. Tingkat efisiensi tersebut menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan perencanaan awal. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan literasi peserta didik pada jenjang SMP telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian indikator Nilai Kemampuan Literasi SMP menunjukkan bahwa berbagai upaya peningkatan literasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama satuan pendidikan telah memberikan hasil yang sesuai dengan target kinerja. Ke depan, upaya penguatan budaya literasi, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pengembangan inovasi dalam pembelajaran berbasis literasi perlu terus dilakukan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih serta mendukung peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama secara berkelanjutan.

7. Nilai Kemampuan Numerasi SD (Nilai)

$$\text{Efisiensi} = \frac{(104.020.640.430,68 \times 116,31\%) - 94.198.471.981,83}{(104.020.640.430,68 \times 116,31\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 22,14\%$$

Tabel 3. 15 Efisiensi Sasaran Strategis 1 Indikator 7

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
116,31%	90,56%	22,14%

Pada indikator Nilai Kemampuan Numerasi SD, capaian kinerja pada tahun pelaporan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi

kinerja sebesar 116,31% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa kemampuan numerasi peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar mengalami peningkatan yang signifikan dan melampaui target yang direncanakan. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran numerasi, antara lain melalui penguatan implementasi kurikulum, peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran matematika yang berorientasi pada pemecahan masalah, serta penerapan berbagai metode pembelajaran yang mendorong kemampuan berpikir logis dan analitis peserta didik.

Selain itu, peningkatan kemampuan numerasi juga didukung oleh berbagai program penguatan pembelajaran di sekolah, seperti pelaksanaan kegiatan pembinaan akademik, pemanfaatan sumber belajar yang lebih variatif, serta pengintegrasian numerasi dalam berbagai mata pelajaran. Upaya tersebut secara bertahap mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami konsep bilangan, melakukan perhitungan, serta menerapkan pengetahuan numerasi dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Dari sisi penggunaan anggaran, realisasi keuangan yang mendukung pencapaian indikator ini tercatat sebesar 90,56% dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan numerasi pada jenjang Sekolah Dasar. Meskipun demikian, masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sepenuhnya yang antara lain disebabkan oleh efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, optimalisasi penggunaan sumber daya yang telah tersedia, serta penyesuaian kebutuhan kegiatan di lapangan.

Dengan capaian kinerja sebesar 116,31% dan realisasi keuangan sebesar 90,56%, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 22,14%. Tingkat efisiensi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan numerasi peserta didik dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih hemat dibandingkan dengan perencanaan awal.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan numerasi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga sumber daya yang tersedia mampu menghasilkan capaian kinerja yang lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian indikator Nilai Kemampuan Numerasi SD menunjukkan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran numerasi di sekolah dasar telah memberikan hasil yang sangat positif. Ke depan, upaya penguatan kompetensi guru, pengembangan metode pembelajaran yang inovatif, serta peningkatan pemanfaatan sumber belajar yang mendukung numerasi perlu terus dilakukan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih, sehingga mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan dasar secara berkelanjutan.

8. Nilai Kemampuan Numerasi SMP (Nilai)

$$\text{Efisiensi} = \frac{(40.710.289.321,43 \times 100,04\%) - 36.584.774.987,61}{(40.710.289.321,43 \times 100,04\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 10,17\%$$

Tabel 3. 16 Efisiensi Sasaran Strategis 1 Indikator 8

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,04%	89,87%	10,17%

Pada indikator Nilai Kemampuan Numerasi SMP, capaian kinerja pada tahun pelaporan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi kinerja sebesar 100,04% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa target peningkatan kemampuan numerasi peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama telah tercapai dan sedikit melampaui target yang direncanakan. Meskipun selisihnya relatif kecil, kondisi ini tetap mencerminkan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

kemampuan numerasi peserta didik telah berjalan secara efektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pencapaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama satuan pendidikan dalam memperkuat kualitas pembelajaran numerasi di tingkat SMP. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran matematika yang menekankan pada kemampuan berpikir logis, analitis, dan pemecahan masalah, penguatan implementasi kurikulum yang mengintegrasikan numerasi dalam berbagai mata pelajaran, serta pelaksanaan berbagai kegiatan pendukung pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk lebih terampil dalam memahami dan menerapkan konsep numerasi.

Selain itu, peningkatan kemampuan numerasi peserta didik juga didukung oleh pemanfaatan berbagai sumber belajar yang relevan, pelaksanaan kegiatan pembinaan akademik, serta upaya mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran melalui metode pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif. Melalui berbagai upaya tersebut, kemampuan peserta didik dalam memahami konsep matematika dasar, melakukan perhitungan, serta menerapkan pengetahuan numerasi dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari dapat terus ditingkatkan.

Dari sisi penggunaan anggaran, realisasi keuangan untuk mendukung pencapaian indikator ini tercatat sebesar 89,87% dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kemampuan numerasi pada jenjang SMP. Sisa anggaran yang tidak terserap sepenuhnya antara lain disebabkan oleh adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia, serta adanya penyesuaian kebutuhan kegiatan di lapangan sehingga penggunaan anggaran dapat dilakukan secara lebih hemat tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program.

Dengan capaian kinerja sebesar 100,04% dan realisasi keuangan sebesar 89,87%, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 10,17%. Tingkat

efisiensi tersebut menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan numerasi peserta didik pada jenjang SMP telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian indikator Nilai Kemampuan Numerasi SMP menggambarkan bahwa pelaksanaan berbagai program peningkatan kualitas pembelajaran numerasi di sekolah menengah pertama telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Ke depan, upaya peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kompetensi guru, serta pengembangan inovasi dalam pembelajaran numerasi perlu terus dilakukan agar capaian yang telah diperoleh dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan pada jenjang SMP.

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kelestarian Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang Dilestarikan

Meningkatnya kelestarian Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang Dilestarikan diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kelestarian Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang Dilestarikan	Persentase Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang Lestari (%)	%	40	50	54,55	60,03	63,64	106,01
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									106,01

Tabel 3. 18 Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya kelestarian Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang Dilestarikan	Persentase Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang Lestari (%)	%	60,03	63,64	106,01%	60,15	105,80

Tabel 3. 19 Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tanah bumbu	Kotabaru	Banjar	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya kelestarian Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang Dilestarikan	Persentase Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang Lestari (%)	%	-	-	-	-	-

a. Persentase Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang Lestari

Persentase Seni, Budaya, Situs, dan Benda Bersejarah yang Lestari adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah seni, budaya, situs, dan benda bersejarah yang terpelihara, terlindungi, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan jumlah keseluruhan seni, budaya, situs, dan benda bersejarah yang terdata di suatu wilayah dalam periode tertentu.

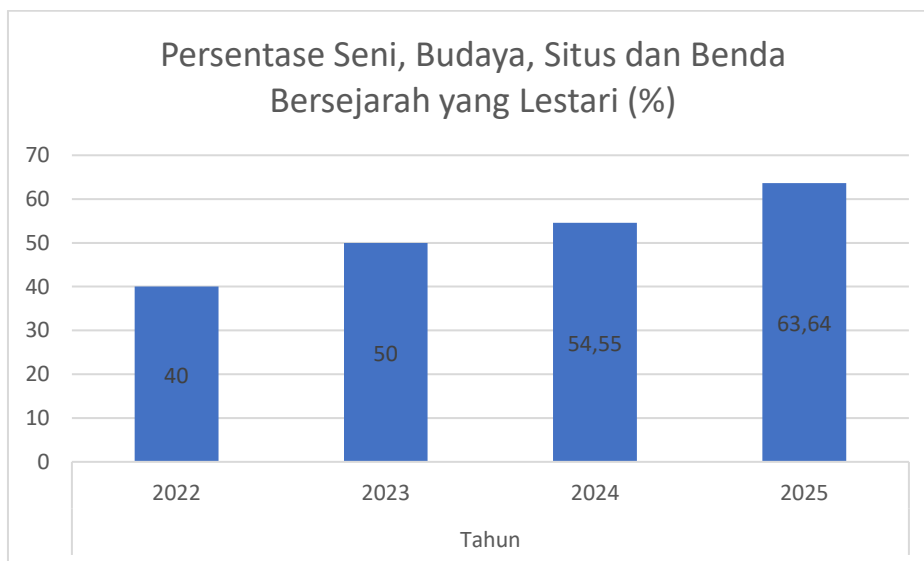
Kelestarian tersebut ditandai dengan adanya kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, atau pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga terkait. Untuk memperoleh Persentase Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang Lestari dengan rumus sebagai berikut :

Persentase Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang Lestari =	Jumlah Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang di Lestarkan	x 100
---	---	-------

Jumlah Seni, Budaya, Situs dan
Benda Bersejarah yang ada

Persentase Seni, Budaya, Situs, dan Benda Bersejarah yang Lestari merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya pelestarian terhadap seni, budaya, situs, dan benda bersejarah yang ada di suatu wilayah. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah seni, budaya, situs, dan benda bersejarah yang telah dilestarikan dengan jumlah keseluruhan seni, budaya, situs, dan benda bersejarah yang ada atau terdata, kemudian dikalikan 100 persen.

Dengan demikian, persentase ini menggambarkan sejauh mana upaya pelestarian telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menjaga keberadaan, nilai, dan keberlanjutan warisan budaya yang dimiliki daerah tersebut. Semakin tinggi persentase yang dihasilkan, maka semakin baik pula tingkat pelestarian seni, budaya, situs, dan benda bersejarah di wilayah tersebut.



Tabel 3. 20 Persentase Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang Lestari Tahun 2022 – 2025

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase Seni, Budaya, Situs, dan Benda Bersejarah yang Lestari dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten. Pada tahun 2022, realisasi indikator ini tercatat sebesar 40%. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 50%, yang menunjukkan

adanya peningkatan upaya pelestarian terhadap seni, budaya, situs, dan benda bersejarah di daerah.

Selanjutnya pada tahun 2024, realisasi kembali meningkat menjadi 54,54%, yang menandakan bahwa program dan kegiatan pelestarian terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 60,03%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang dicapai pada tahun tersebut adalah 63,64%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 106,01% dari target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kinerja pada tahun 2025 tidak hanya menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga berhasil melampaui target yang telah direncanakan. Hal ini menggambarkan bahwa upaya pelestarian seni, budaya, situs, dan benda bersejarah di daerah telah berjalan dengan baik serta didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang efektif dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya daerah.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra pada indikator Persentase Seni, Budaya, Situs, dan Benda Bersejarah yang Lestari menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2025, realisasi indikator tersebut mencapai 63,64%, sementara target akhir Renstra yang telah ditetapkan adalah sebesar 60,15%.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja pada tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra yang direncanakan. Selisih antara realisasi dengan target akhir Renstra adalah sebesar 3,49 poin persentase. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target akhir Renstra telah mencapai sekitar 105,80%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian seni, budaya, situs, dan benda bersejarah di daerah telah dilaksanakan secara optimal dan efektif melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan warisan budaya daerah. Keberhasilan melampaui target akhir Renstra juga mencerminkan adanya peningkatan komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menjaga kelestarian nilai-nilai budaya dan peninggalan sejarah sebagai bagian penting dari identitas serta kekayaan budaya daerah.

Selain itu, capaian tersebut mengindikasikan bahwa strategi, kebijakan, dan program yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra berjalan dengan baik dan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah seni, budaya, situs, dan benda bersejarah yang dilestarikan. Ke depan, capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui penguatan program pelestarian, pendataan, perlindungan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga warisan budaya daerah.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase Seni, Budaya, Situs, dan Benda Bersejarah yang Lestari dengan kabupaten/kota lain, tingkat provinsi, maupun nasional belum dapat dilakukan secara langsung. Hal ini disebabkan karena indikator tersebut tidak secara spesifik digunakan atau dipublikasikan secara seragam pada tingkat kabupaten/kota lain, provinsi, maupun nasional.

Selain itu, setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik, potensi, serta keberagaman seni, budaya, situs, dan benda bersejarah yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menyebabkan pendekatan pengukuran terhadap pelestarian warisan budaya juga dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, indikator ini lebih bersifat spesifik daerah dan disesuaikan dengan kondisi, potensi, serta kebijakan pelestarian kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah.

Dengan demikian, realisasi kinerja indikator Persentase Seni, Budaya, Situs, dan Benda Bersejarah yang Lestari lebih tepat digunakan untuk mengukur perkembangan dan keberhasilan upaya pelestarian kebudayaan di daerah secara internal dari tahun ke tahun, dibandingkan untuk dilakukan perbandingan secara langsung dengan daerah lain, provinsi, maupun tingkat nasional. Meskipun demikian, capaian indikator ini tetap dapat menggambarkan komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam menjaga serta melestarikan warisan seni, budaya, situs, dan benda bersejarah sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya daerah.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan “Meningkatnya kelestarian Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang Dilestarikan”, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melaksanakan.

a. Peningkatan perlindungan cagar budaya

1. Pelestarian Cagar Budaya

Dalam rangka pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah, berbagai kegiatan telah dilaksanakan yang melibatkan masyarakat maupun peserta didik sebagai generasi penerus agar lebih mengenal, memahami, serta menjaga warisan budaya yang ada.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Jelajah Cagar Budaya yang diikuti oleh 75 orang peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan di Museum Lambung Mangkurat sebagai sarana edukasi bagi peserta didik untuk mengenal lebih dekat berbagai peninggalan sejarah dan budaya daerah. Dalam kegiatan ini, para peserta didik diajak untuk mengunjungi berbagai ruang pameran museum yang menampilkan koleksi benda-benda bersejarah seperti artefak budaya, peralatan tradisional, naskah kuno, serta berbagai peninggalan yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa lampau. Peserta juga mendapatkan penjelasan langsung dari pemandu museum mengenai nilai sejarah, fungsi, serta makna budaya dari setiap koleksi yang dipamerkan. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap sejarah dan budaya daerah serta memiliki kesadaran untuk turut menjaga dan melestarikan cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai permuseuman, juga dilaksanakan kegiatan Cerdas Cermat Permuseuman yang diikuti oleh 66 orang peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai museum, fungsi museum, serta berbagai koleksi sejarah dan budaya yang dimiliki daerah. Melalui kegiatan ini para peserta diuji pemahamannya mengenai sejarah, kebudayaan daerah, serta pengetahuan mengenai benda-benda bersejarah yang terdapat di museum. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran yang menarik dan interaktif sehingga mampu menumbuhkan minat peserta didik untuk lebih mengenal dan mengunjungi museum sebagai pusat informasi sejarah dan kebudayaan.

Upaya pelestarian budaya juga dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Penetapan Cagar Budaya yang diikuti oleh 22 orang peserta yang terdiri dari unsur masyarakat, perangkat desa, serta pihak terkait lainnya. Kegiatan ini

bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya proses penetapan cagar budaya, kriteria suatu objek dapat ditetapkan sebagai cagar budaya, serta mekanisme perlindungan dan pelestarian terhadap objek yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, maupun kebudayaan. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian yang lebih besar dalam menjaga serta melaporkan keberadaan objek-objek yang berpotensi menjadi cagar budaya di lingkungan sekitarnya.

Selain kegiatan edukasi dan sosialisasi, upaya pelestarian budaya juga diwujudkan melalui rehabilitasi beberapa situs cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dan religius bagi masyarakat. Kegiatan rehabilitasi ini dilakukan untuk menjaga kelestarian bangunan serta mempertahankan nilai historis yang terkandung di dalamnya. Beberapa objek cagar budaya yang direhabilitasi antara lain Rehabilitasi Makam Habib Alwi bin Idrus Bahasyim yang berada di Desa Handil Birayang Bawah, Kecamatan Bumi Makmur. Selain itu juga dilaksanakan Rehabilitasi Makam Keramat Istana yang berada di Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, serta Rehabilitasi Makam KH. Abdussamad Khairi yang terletak di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung.

Kegiatan rehabilitasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kondisi fisik situs agar tetap terawat, memperbaiki bagian bangunan yang mengalami kerusakan, serta mempertahankan keaslian bentuk dan nilai sejarah yang dimiliki oleh situs tersebut. Dengan dilaksanakannya rehabilitasi ini diharapkan situs-situs bersejarah tersebut dapat terus terjaga keberadaannya dan tetap dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi sejarah, religi, serta sebagai bagian dari identitas budaya daerah.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, baik dalam bentuk edukasi, sosialisasi, maupun rehabilitasi situs bersejarah, diharapkan upaya pelestarian budaya dapat berjalan secara berkelanjutan serta mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan generasi muda untuk turut menjaga dan melestarikan warisan budaya yang dimiliki daerah..

Berikut dokumentasi kegiatan pelestarian cagar budaya sebagai berikut :



Gambar 3. 31 kegiatan jelajah cagar budaya



Gambar 3. 32 Kegiatan Cerdas Cermat Permuseuman



Gambar 3. 33 rehabilitasi makam keramat

2. Pelestarian kesenian dan tradisi

Dalam rangka pelestarian kesenian dan tradisi daerah, berbagai kegiatan seni dan budaya telah dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya sekaligus menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap seni tradisional dan kearifan lokal. Kegiatan-kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari peserta didik, sanggar seni, hingga perangkat daerah, sehingga pelestarian budaya dapat berjalan secara berkelanjutan.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Festival Karya Seni Daerah yang diikuti oleh 15 grup sanggar atau kelompok seni. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan berbagai bentuk kesenian daerah seperti tari tradisional, musik tradisional, dan pertunjukan seni lainnya yang mencerminkan kekayaan budaya daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku seni dapat terus mengembangkan kreativitas sekaligus menjaga keberlanjutan seni tradisional agar tetap dikenal oleh generasi muda.

Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Gita Bahana Nusantara sebagai bagian dari upaya pengembangan seni musik dan vokal di kalangan generasi muda. Kegiatan ini diikuti oleh 33 peserta yang terdiri dari 18 peserta putri dan 15 peserta putra. Para peserta yang terpilih nantinya akan

mendapatkan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan vokal serta memperkuat rasa nasionalisme melalui seni musik.

Upaya pelestarian kesenian tradisional juga diwujudkan melalui Pertunjukan Wayang Banjar, yang merupakan salah satu seni pertunjukan tradisional khas Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali kesenian wayang Banjar kepada masyarakat sekaligus menjaga agar kesenian tradisional tersebut tetap lestari dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Selain sebagai hiburan, pertunjukan ini juga mengandung nilai-nilai moral, pendidikan, dan filosofi kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun.

Selanjutnya dilaksanakan kegiatan Kreasi Nasi Tumpeng yang diikuti oleh berbagai unsur masyarakat dengan jumlah peserta yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu tingkat sekolah sebanyak 10 grup, tingkat umum sebanyak 15 grup, dan tingkat SKPD sebanyak 17 grup. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan kreativitas dalam penyajian makanan tradisional, tetapi juga menjadi sarana untuk melestarikan tradisi kuliner Nusantara yang memiliki makna filosofis dalam kehidupan masyarakat.

Kegiatan budaya lainnya yang juga dilaksanakan adalah Gema Takbir, yang merupakan kegiatan yang memadukan unsur seni, religi, dan tradisi masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh dua kategori peserta, yaitu kategori umum sebanyak 16 grup dan kategori SKPD sebanyak 35 grup. Melalui kegiatan ini masyarakat dapat mengekspresikan semangat kebersamaan dan nilai-nilai religius melalui berbagai kreasi penampilan yang menarik dan kreatif.

Dalam rangka pengembangan generasi muda yang berperan sebagai duta budaya daerah, juga dilaksanakan Pemilihan Nanang Galuh Tanah Laut Tahun 2025 yang diikuti oleh 115 peserta, terdiri dari 80 peserta putri dan 35 peserta putra. Kegiatan ini bertujuan untuk memilih generasi muda yang memiliki wawasan budaya, kepribadian yang baik, serta kemampuan untuk mempromosikan potensi budaya dan pariwisata daerah.

Selain itu juga diselenggarakan Karnaval Seni Budaya yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dengan jumlah peserta yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu kategori sekolah sebanyak 10 grup, kategori umum sebanyak 14 grup, dan kategori SKPD sebanyak 35 grup. Karnaval

ini menampilkan berbagai kostum dan atraksi seni yang menggambarkan kekayaan budaya daerah, sehingga menjadi sarana promosi budaya sekaligus hiburan bagi masyarakat.

Kegiatan lain yang turut mendukung pelestarian seni dan budaya adalah Tuntung Pandang Art Festival, yang menjadi ruang bagi para seniman dan pelaku budaya untuk menampilkan berbagai karya seni kreatif yang mengangkat nilai-nilai budaya lokal. Festival ini juga menjadi ajang kolaborasi antar pelaku seni serta sarana untuk memperkenalkan potensi seni daerah kepada masyarakat yang lebih luas.

Selain kegiatan seni pertunjukan dan festival budaya, juga dilaksanakan Sosialisasi Pembinaan Sejarah Lokal yang diikuti oleh 55 orang peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sejarah lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal sejarah daerahnya serta berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai sejarah yang ada di lingkungan masing-masing.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan pelestarian kesenian, tradisi, dan sejarah daerah dapat terus terjaga serta diwariskan kepada generasi berikutnya, sehingga kekayaan budaya yang dimiliki daerah tetap lestari dan menjadi bagian penting dalam memperkuat jati diri masyarakat.

Berikut dokumentasi kegiatan pelestarian kesenian dan tradisi sebagai berikut :

7) Faktor Pendorong/Keberhasilan Bidang Kebudayaan

1. Komitmen pemerintah daerah

Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah melalui kebijakan, program, serta alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan pelestarian seni, tradisi, dan cagar budaya.

2. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Tingginya kesadaran masyarakat untuk menjaga, melestarikan, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan seni budaya, seperti festival, pertunjukan seni, serta kegiatan adat dan tradisi.

3. Peran Komunitas Seni dan Budaya

Keberadaan sanggar seni, komunitas budaya, dan kelompok masyarakat adat yang secara aktif melakukan pembinaan, pelatihan, dan pertunjukan seni budaya secara berkelanjutan.

4. Dukungan Lembaga Pendidikan

Integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam kegiatan pendidikan, seperti melalui kurikulum muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler seni, dan kegiatan pembelajaran berbasis budaya.

5. Pendokumentasian dan Inventarisasi Budaya

Adanya upaya pencatatan, pendokumentasian, dan inventarisasi kesenian, tradisi, serta cagar budaya sehingga keberadaannya dapat terdata dengan baik dan mudah dilestarikan.

6. Penyelenggaraan Event dan Festival Budaya.

Kegiatan festival seni, pertunjukan budaya, dan lomba-lomba tradisional yang rutin dilaksanakan mampu meningkatkan minat masyarakat sekaligus menjadi sarana promosi budaya daerah.

8) Faktor Penghambat/Kegagalan Bidang Kebudayaan

1. Partisipasi Masyarakat yang Belum Optimal

Minat dan keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengikuti atau menampilkan kesenian tradisional masih relatif rendah sehingga jumlah peserta kegiatan menjadi terbatas.

2. Kurangnya Regenerasi Pelaku Seni

Belum optimalnya proses regenerasi pelaku seni tradisional menyebabkan beberapa jenis kesenian mengalami penurunan jumlah penampil atau bahkan terancam tidak lagi dipentaskan.

3. Pengaruh Budaya Modern

Masuknya budaya modern dan hiburan digital menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, lebih tertarik pada budaya populer dibandingkan kesenian tradisional.

4. Kurangnya Promosi dan Publikasi Kegiatan

Informasi mengenai kegiatan festival atau pertunjukan budaya belum tersosialisasi secara luas sehingga tingkat kehadiran masyarakat dan peserta menjadi kurang maksimal.

5. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan alokasi anggaran menyebabkan penyelenggaraan kegiatan festival seni dan budaya tidak dapat dilaksanakan secara optimal, baik dari segi jumlah kegiatan, kualitas pelaksanaan, maupun dukungan fasilitas yang diperlukan.

6. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung.

Ketersediaan tempat pertunjukan, perlengkapan panggung, serta fasilitas pendukung lainnya masih terbatas sehingga mempengaruhi kualitas penyelenggaraan kegiatan.

9) Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan Bidang Kebudayaan

1. Meningkatkan Dukungan Anggaran dan Program Pelestarian Budaya

Pemerintah daerah akan mengupayakan peningkatan alokasi anggaran serta memperkuat program dan kegiatan yang mendukung pelestarian kesenian, tradisi, dan cagar budaya agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan lebih optimal.

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Generasi Muda

Mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, melalui kegiatan festival seni budaya, lomba kesenian daerah, serta kegiatan edukasi budaya di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

3. Pembinaan dan Penguatan Sanggar Seni

Melaksanakan pembinaan, pelatihan, serta fasilitasi bagi sanggar seni dan kelompok kesenian agar tetap aktif dalam mengembangkan dan menampilkan kesenian tradisional daerah.

4. Penguatan Kerja Sama dengan Berbagai Pihak

Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas budaya, akademisi, serta pihak swasta dalam mendukung kegiatan pelestarian seni, tradisi, dan cagar budaya

5. Penyediaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Kegiatan Budaya

Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung seperti tempat pertunjukan, perlengkapan seni, dan sarana pendukung lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan seni dan budaya secara lebih baik.

6. Peningkatan Promosi dan Publikasi Budaya

Memfaatkan media sosial, media massa, serta berbagai platform digital untuk mempromosikan kegiatan seni dan budaya sehingga dapat menarik minat masyarakat yang lebih luas.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya kelestarian Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang Dilestarikan di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 4390 ASN pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan serta di dukung oleh 4 Program dengan Pagu Rp. 5.445.386.743,91 dan terealisasi Rp. 5.139.705.800,00 atau sebesar 94,39%

Tabel 3. 21 Realisasi Program penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program pengembangan kebudayaan	4.342.108.636,42	4.145.871.960,00
2	Program pengembangan kesenian tradisional	299.917.046,36	287.531.340,00
3	Program pembinaan sejarah	49.999.661,98	38.795.000,00
4	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	753.361.399,15	667.507.500,00
JUMLAH		5.445.386.743,91	5.139.705.800,00

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Persentase Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang Lestari (%)

$$\text{Efisiensi} = \frac{(5.445.386.743,91 \times 106,01) - 5.139.705.800,00}{(5.445.386.743,91 \times 106,01)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 10,96 \%$$

Tabel 3. 22 Efisiensi Sasaran Strategis 2 Indikator 9

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
106,01%	94,39%	10,96%

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang Lestari (%) pada tahun berjalan mencapai 106,01% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelestarian seni, budaya, situs, dan benda bersejarah telah berjalan dengan sangat baik dan mampu melampaui target kinerja yang direncanakan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh perangkat daerah melalui pelaksanaan kegiatan pelestarian budaya, antara lain penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah, pertunjukan kesenian tradisional, pembinaan sanggar seni, serta kegiatan inventarisasi, pendataan, dan pendokumentasian objek budaya dan cagar budaya yang ada di daerah.

Selain itu, keberhasilan capaian kinerja tersebut juga didukung oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dan komunitas seni dalam berbagai kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Keterlibatan aktif sanggar seni, kelompok masyarakat, serta pelaku budaya menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pelestarian seni dan budaya daerah. Di samping itu, adanya dukungan kebijakan dan program pemerintah daerah yang secara konsisten mendorong penguatan nilai-nilai budaya lokal turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah seni, budaya, situs, dan benda bersejarah yang dapat dilestarikan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi keuangan pada indikator ini mencapai 94,39% dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan sebagian besar anggaran yang direncanakan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Sementara itu, tingkat efisiensi anggaran sebesar 10,96% menunjukkan bahwa capaian kinerja yang melebihi target dapat diraih dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih hemat. Efisiensi ini mencerminkan adanya pengelolaan anggaran yang efektif serta optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga output dan outcome yang diharapkan tetap dapat tercapai bahkan melampaui target yang direncanakan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada indikator Persentase Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang Lestari (%) menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pelestarian kebudayaan telah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya daerah sebagai bagian penting dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat.

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengelola anggaran yang bersumber dari pendapatan dan belanja daerah secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencapaian kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2025, target pendapatan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut ditetapkan sebesar Rp278.800.500,00. Dari target tersebut, realisasi pendapatan yang berhasil dicapai hingga akhir tahun anggaran adalah sebesar Rp314.804.211,72. Dengan demikian, realisasi pendapatan melampaui target yang telah ditetapkan, yang menunjukkan adanya kinerja pengelolaan pendapatan yang cukup optimal.

Sementara itu, dari sisi belanja daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengelola total anggaran belanja sebesar Rp663.066.204.752,15. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi belanja tercatat sebesar Rp606.247.758.028,96 atau sekitar 91,43% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar

program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik serta didukung oleh penyerapan anggaran yang cukup optimal.

Secara lebih rinci, komponen belanja tersebut terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi dialokasikan sebesar Rp571.524.573.243,66, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional perangkat daerah, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja operasional lainnya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan pendidikan dan kebudayaan. Dari alokasi tersebut, realisasi belanja operasi mencapai Rp523.232.897.019,96 atau sekitar 91,55%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun belanja modal dialokasikan sebesar Rp91.541.631.508,49, yang digunakan untuk mendukung penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta infrastruktur pendukung lainnya. Belanja modal ini meliputi antara lain pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, pengadaan peralatan pendidikan, serta peningkatan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi belanja modal tercatat sebesar Rp83.014.861.009,00 atau sekitar 90,69% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian realisasi pendapatan dan belanja pada Tahun Anggaran 2025 mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan efisien, dengan tetap berorientasi pada pencapaian sasaran kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Optimalisasi pemanfaatan anggaran tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta mendukung terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Tanah Laut.

TUJUAN I

Tabel 3. 23 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian		Anggaran	Realiasasi	Persentase
								Rp	Rp	%
1.	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 – 6 Tahun (Angka)	87,18	81,17	1	Program Pengelolaan Pendidikan	181.412.792.193,82	161.541.546.261,40	89,05
		2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 12 Tahun (Angka)	98,53	98,73					
		3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 Tahun (Angka)	94,01	93,36			
		4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	54,76	56,93					

			Tahun (Angka)							
		5	Nilai Kemampuan Literasi SD (Nilai)	71,03	71,98					
		6	Nilai Kemampuan Literasi SMP (Nilai)	83,59	83,59					
		7	Nilai Kemampuan Numerasi SD (Nilai)	54,74	63,67					
		8	Nilai Kemampuan Numerasi SMP (Nilai)	78,09	78,12					
2	Meningkatnya kelestarian Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang Dilestarikan	1	Persentase Seni, Budaya, Situs dan Benda Bersejarah yang Lestari (%)	60,03	63,64	1	Program pengembangan kebudayaan	4.342.108.636,42	4.145.871.960,00	95,48
						1	Program pengembangan	299.917.046,36	287.531.340,00	95,87

							an kesenian tradisional			
						1	Program pembinaan sejarah	49.999.661,98	38.795.000,00	77,59
						1	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	753.361.399,15	667.507.500,00	88,60

Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025
1	2	3	6
4	PENDAPATAN DAERAH	278.800.500,00	314.804.211,72
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	278.800.500,00	314.804.211,72
4.1.02	Retribusi Daerah	278.800.500,00	290.120.500,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	24.683.711,72
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	278.800.500,00	314.804.211,72
	JUMLAH PENDAPATAN	278.800.500,00	314.804.211,72
5	BELANJA DAERAH	663.066.204.752,15	606.247.758.028,96
5.1	BELANJA OPERASI	571.524.573.243,66	523.232.897.019,96
5.1.01	Belanja Pegawai	465.674.437.051,00	430.658.065.038,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.371.634.611,36	73.031.588.251,96
5.1.05	Belanja Hibah	20.478.501.581,30	19.543.243.730,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	571.524.573.243,66	523.232.897.019,96
5.2	BELANJA MODAL	91.541.631.508,49	83.014.861.009,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.815.085.915,00	22.925.926.091,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.841.026.952,51	58.415.004.032,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.706.975.140,98	1.588.328.886,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	145.243.500,00	53.102.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	33.300.000,00	32.500.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	91.541.631.508,49	83.014.861.009,00
	JUMLAH BELANJA	663.066.204.752,15	606.247.758.028,96
	SURPLUS/DEFISIT	(662.787.404.252,15)	(605.932.953.817,24)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(662.787.404.252,15)	(605.932.953.817,24)

Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	% Kenaikan Penurunan
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	278.800.500,00	314.804.211,72	326.911.269,07	-3,70
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	278.800.500,00	314.804.211,72	326.911.269,07	-3,70
4.1.02	Retribusi Daerah	278.800.500,00	290.120.500,00	292.726.500,00	-0,89
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	24.683.711,72	34.184.769,07	-27,79
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	278.800.500,00	314.804.211,72	326.911.269,07	-3,70
	JUMLAH PENDAPATAN	278.800.500,00	314.804.211,72	326.911.269,07	-3,70
5	BELANJA DAERAH	663.066.204.752,15	606.247.758.028,96	616.415.138.300,87	-1,65
5.1	BELANJA OPERASI	571.524.573.243,66	523.232.897.019,96	490.002.302.352,91	6,78
5.1.01	Belanja Pegawai	465.674.437.051,00	430.658.065.038,00	394.494.177.786,00	9,17
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.371.634.611,36	73.031.588.251,96	76.267.786.204,00	-4,24
5.1.05	Belanja Hibah	20.478.501.581,30	19.543.243.730,00	19.240.338.362,91	1,57
	JUMLAH BELANJA OPERASI	571.524.573.243,66	523.232.897.019,96	490.002.302.352,91	6,78
5.2	BELANJA MODAL	91.541.631.508,49	83.014.861.009,00	126.412.835.947,96	-34,33
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.815.085.915,00	22.925.926.091,00	41.611.066.546,00	-44,90
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.841.026.952,51	58.415.004.032,00	82.856.936.716,96	-29,50
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.706.975.140,98	1.588.328.886,00	1.864.734.685,00	-14,82

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	145.243.500,00	53.102.000,00	80.098.000,00	-33,70
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	33.300.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	91.541.631.508,49	83.014.861.009,00	126.412.835.947,96	-34,33
	JUMLAH BELANJA	663.066.204.752,15	606.247.758.028,96	616.415.138.300,87	-1,65
	SURPLUS/DEFISIT	(662.787.404.252,15)	(605.932.953.817,24)	(616.088.227.031,80)	-1,65
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(662.787.404.252,15)	(605.932.953.817,24)	(616.088.227.031,80)	-1,65

Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 .

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **2 Sasaran 9 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 102,25% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 91%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan dan verifikasi anak usia sekolah secara berkala melalui integrasi data Dapodik, Dukcapil, dan pemerintah desa.
2. Melaksanakan program penjangkauan kembali (retrieval program) bagi anak putus sekolah melalui pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C).
3. Meningkatkan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang tingkat partisipasi sekolahnya masih rendah.
4. Memberikan dukungan bantuan pendidikan seperti beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, atau transportasi bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
5. Mendorong lembaga pendidikan nonformal dan pesantren untuk terdaftar dalam sistem pendataan nasional agar peserta didik tetap tercatat dalam sistem pendidikan.
6. Melaksanakan supervisi akademik secara berkala untuk memastikan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan platform pembelajaran digital untuk memperkaya proses belajar mengajar.

8. Meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis pembelajaran inovatif.
9. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, ruang belajar, serta fasilitas sekolah secara bertahap.
10. Meningkatkan ketersediaan perangkat teknologi pembelajaran, seperti Chromebook, smartboard, dan jaringan internet sekolah.
11. Memprioritaskan pemerataan fasilitas pendidikan terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan sarana.
12. Mendorong kegiatan festival budaya, pameran, dan pertunjukan seni daerah untuk meningkatkan apresiasi masyarakat.
13. Melakukan pendataan dan inventarisasi seni, budaya, situs, dan benda bersejarah secara sistematis.
14. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas budaya dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah.

Pelaihari, Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut



MYRZA FAZRINA, ST, MT
NIP 198003222006042012

LAMPIRAN